

**PROSES DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN
ANGGARAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN PASAR
KABUPATEN BULUKUMBA**

*THE PROCESS AND FACTORS AFFECTING BUDGET ARRANGEMENT AT THE
DEPARTMENT OF REGIONAL REVENUE AND MARKET
OF BULUKUMBA REGENCY*

ANDI ENDANG HARIYANI DARWIS



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

**PROSES DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN
ANGGARAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN PASAR
KABUPATEN BULUKUMBA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister

**PROGRAM STUDI
MAGISTER KEUANGAN DAERAH**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI ENDANG HARIYANI DARWIS

kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

TESIS

PROSES DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN ANGGARAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN PASAR KABUPATEN BULUKUMBA

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI ENDANG HARIYANI DARWIS

No. Pokok : P2600204568

Telah di pertahankan didepan panitia ujian tesis
Pada tanggal 30 April 2008
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasehat

Prof. Dr. H. A. Karim Saleh
Ketua

Ketua Program
Magister Keuangan Daerah

Prof. Dr. Hj. Siti Haerani, SE, M.Si
Anggota

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. H. Muh. Yunus Zain, MA

Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.Sc

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI ENDANG HARIYANI DARWIS
Nomor Induk Mahasiswa : P2600204568
Program Studi : Magister Keuangan Daerah

Menyatakan bahwa tesis yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi dari tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, April 2008

Yang menyatakan,

ANDI ENDANG HARIYANI DARWIS

PRA KATA

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat,rahmat dan petunjuknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ Proses dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba”

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat Akademik guna memperoleh Gelar Magister pada program Study Magister Keuangan Daerah (MKD) Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. H. A. Karim Saleh selaku pembimbing I dan Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Haerani, SE., M. Si selaku pembimbing II yang telah banyak mencurahkan pikiran dan meluangkan waktu serta dengan kesabaran, ketekunan dan kebijaksanaannya membimbing penulis dalam pembuatan tesis ini.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Bupati Kabupaten Bulukumba dalam memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan Magister di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba beserta seluruh jajarannya dalam memberikan kesempatan untuk melakukan pengambilan data serta melakukan penelitian.

3. Kepada Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pada Program Magister Keuangan Daerah yang telah meluangkan waktu dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Drs. Mansur G. M. Si Selaku Kepala Sub. Bidang Anggaran pada BKAD yang telah meluangkan waktunya dan memberi saran dalam kepada penulis.
5. Rekan-rekan Mahasiswa khususnya seangkatan dengan penulis kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan sarannya dalam penulisan tesis ini.
6. Secara Khusus pada suami tercinta (Drs. Amri Nampo, M. Si) dan kedua anakku yakni Jihan Asyura dan Luthfi Muh. Abdillah yang dengan penuh kesabaran dan kesetiaan dalam memberikan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
7. Kedua orang tua yang kusayangi Drs. H. M. Darwis MG dan Hj. A. Rosmiaty Gau selalu memberikan doa, bantuan dan dukungannya.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan rahmatnya bagi kita semua.

Akhirnya disadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu, segala kritikan dan saran yang positif konstruktif akan disambut dengan senang hati demi penyempurnaan tulisan ini.

Makassar, April 2008

Penulis,

Andi Endang Hariyani Darwis

ABSTRAK

ANDI ENDANG HARIYANI DARWIS. *Proses dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba* (dibimbing oleh H.A. Karim Saleh dan Sitti Haerani).

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis proses dan faktor-faktor yang memengaruhi penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba.

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba. Sampel diambil secara acak sederhana sebanyak seratus orang. pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, kuesioener, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran pada Dispenda dan Pasar Kabupaten Bulukumba berada pada kategori cukup sesuai dengan program dan perencanaan unit kerja, tugas pokok dan fungsi unit kerja, serta kewajaran antara anggaran dengan target kinerja berdasarkan SAB (standa analisa belanja) yang telah diperhitungkan. Ada beberapa faktor yang secara signifikan mempengaruhi proses penyusunan anggaran, masing-masing: (a) kuliatas (kompetensi) SDM aparatur berada pada kategori kurang berkualitas, (b) dukungan sarana dan prasarana berupa jumlah dan kualitasnya berada pada kategori kurang mendukung, dan (c) kompleksitas (jumlah) program dan kegiatan berada pada kategori kurang kompleks. Berdasarkan model persamaan linear dari hubungan antara subvariabel kualitas sumber daya manusia aparatur, dukungan sarana dan prasarana, dan kompleksitas program dan kegiatan terhadap proses penyusunan anggaran pada Dispenda dan Pasar Kabupaten Bulukumba adalah $Y = 0,467 X_1 + 0,405 X_2 + 0,215 X_3 - 0,615$. Persamaan ini menunjukkan bahwa hubungan Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba akan membentuk hubungan positif baik secara sendiri-sendir maupun secara bersama-sama.

ABSTRACT

ANDI ENDANG HARIYANI DARWIS. *The Process and factors Affecting Budget Arrangement at the Department of Regional Revenue and Market of Bulukumba Regency* (supervised by H. A. Karim Saleh and Hj. Sitti Haerani)

This research aimed to find out and analyze the process and factors affecting the arrangement of budget at the Department of Regional Revenue and Market of Bulukumba Regency.

This research was carried out at the Department of Regional Revenue and Market of bulukumba Regency. The sample consisted of 100 respondents selected using random sampling. The data were obtained through observation, questionnaire, interview, and documentation techniques. They were then analyzed using descriptive qualitative method.

The results show that the process of budget arrangement at Regional Revenue Department and Market of Bulukumba Regency is at adequate category. This is in line with the program and planning of work unit, main duty, function of work unit, and the fittingness between budget and performance target based on budget analysis standard. There are several factors which significantly influence the process of arrangement of budget at the Department of Regional Revenue and Market of Bulukumba Regency such as (1) apparatus resources who are not qualified enough; (2) facilities and infrastructures, that is, their number and quality which are not supporting enough; (3) the number of programs and activities which are not complex enough. Based on linear equity model of correlation between sub variables of apparatus resources quality, facilities and infrastructures, and complexity of program and activities, the process of budget arrangement of Regional Revenue and Market of Bulukumba Regency becomes $Y = 0,615 + 0,467 X1 + 0,405 X2 + 0,215 X3$. This indicates that the correlation among factors affecting the process of budget arrangement at the Department of Regional Revenue and Market of Bulukumba Regency is Positive either individually or collectively.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memasuki era otonomi daerah, lebih mendasar daripada berbagai paket kebijakan serupa di masa-masa yang lalu, yakni sejak diterapkannya *Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999* yang saat ini telah diganti dengan *UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* dan *UU Nomor 25 Tahun 1999* yang juga telah diganti dengan *UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Menurut ketentuan umum *UU Nomor 32 Tahun 2004*, bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan lainnya, yaitu dengan membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu strategi yang bertujuan ganda. Pertama, pemberian otonomi daerah merupakan strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu *sharing of power*, *distribution of income* dan kemandirian sistem manajemen di daerah. Kedua, otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani dalam meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Pembangunan secara luas selalu mengacu kepada proses perubahan struktural, baik struktur ekonomi maupun sosial budaya yang dapat menciptakan suatu kondisi kemajuan bagi kehidupan umat manusia. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan sejumlah sumber daya dan perumusan kebijakan dasar yang dilandasi dengan pengetahuan atas kondisi sosial ekonomi masyarakat, potensi, permasalahan dan berbagai alternatif serta kemungkinan-kemungkinannya. Selanjutnya, menyangkut pilihan atas berbagai alternatif fundamental seperti apakah tujuan ditekankan kepada laju

pertumbuhan yang tinggi atau kepada keadilan sosial (*growth versus equity*), apakah dalam bidang ekonomi ditekankan kepada peningkatan produksi dan produktifitas atau kepada perluasan kesempatan kerja bahkan kepada pilihan antara penekanan sektor-sektor tertentu dibandingkan dengan sektor yang lain.

Pemerintah memegang peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan suatu daerah, karena dengan melalui pengeluaran, pemerintah berperan menjamin bahwa suatu keputusan yang menyangkut pengalokasian dana yang terbatas telah mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan akibat yang akan timbul jika dilihat dari perekonomian secara keseluruhan.

Dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, *Mardiasmo (1991: 11)* mengatakan bahwa salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah, karena anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, maka anggaran daerah memiliki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran dan otorisasi pengeluaran di masa yang akan datang. Dengan

demikian, DPRD dan Pemerintah Daerah harus berupaya secara konkret dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang betul-betul mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di daerah sesuai dengan potensi masing-masing.

Sejalan dengan pendapat *Mardiasmo* di atas, *Yuwono, Tengku dan Hariyadi (2005)*, mengatakan bahwa APBD merupakan dokumen yang mencerminkan kondisi keuangan dari pemerintah daerah, didalamnya meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Melalui suatu analisis, APBD juga dapat menggambarkan rencana strategis (*renstra*) yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan otonomi daerah yang mensyaratkan pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengelola keuangannya secara mandiri.

APBD di masing-masing daerah mempunyai masa tahun anggaran yang sama yakni 1 (satu) tahun takwin, 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Anggaran yang disusun ini berdasarkan basis prestasi (*performance basis*) yang disesuaikan dengan perencanaan fiskal dan sistem penyusunan anggaran tahunan serta diseleraskan sesuai dengan kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure frame work*) (*Barata dan Bambang, 2004*).

Lebih lanjut, dikemukakan bahwa penyusunan rencana anggaran pembangunan salah satu kegiatannya adalah identifikasi kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan serta mempertimbangkan kebijaksanaan

menyangkut pengalokasian pada program-program yang dihubungkan baik dengan tujuan perekonomian secara keseluruhan maupun sarana-sarana spesifik sektoral dan regional tertentu.

Sebagai stabilisator pembangunan, anggaran belanja pembangunan di dalam kerangka pelaksanaan prinsip anggaran berimbang yang dinamis diharapkan mampu menjadi sumber pengamanan terakhir di dalam upaya menjadi keserasian antara pengeluaran daerah dan penerimaan daerah sehingga dapat memantapkan stabilitas ekonomi sekaligus menjamin terus berlansungnya pembangunan daerah.

Sebagai dinamisator ekonomi masyarakat, anggaran belanja pembangunan diharapkan mampu menunjang berkembangnya potensi ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Hal ini terutama karena sebagai sumber utama pembiayaan investasi di sektor pemerintah, jumlah dan alokasi anggaran pembangunan sangat mempengaruhi kesinambungan pembangunan, terutama dalam mendorong perkembangan kegiatan dunia usaha dan laju pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang memang tidak dapat dibiayai sendiri oleh masyarakat dan dunia usaha, diantaranya meliputi penyediaan sarana dan prasarana dasar yang memiliki peran strategis di dalam proses pembangunan, pengembangan sumber daya manusia, serta proyek-proyek pembangunan

produktif lainnya yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebagai akselerator pembangunan, strategi kebijakan alokasi anggaran belanja pembangunan selalu diarahkan untuk makin menunjang pemerataan pembangunan dan hasil-hasil secara lebih adil dan meluas, dengan antara lain mencegah melebarnya kesenjangan antar golongan pendapatan, antar daerah dan antar sektor, diupayakan antara lain dengan meningkatkan keterkaitan dan keterpaduan alokasi pembiayaan proyek-proyek pembangunan antar sektor-sektor ekonomi terutama sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa sehingga diharapkan secara bertahap tercipta keseimbangan peranan dan sumbangan ketiga sektor ekonomi tersebut dalam pencapaian nilai tambah dan produktifitas ekonomi daerah yang tinggi yang pada akhirnya dapat mengurangi ketimpangan pendapat.

Berdasarkan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan dengan surat edaran Kepala Daerah yang didalamnya memuat Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang ditetapkan, pemerintah daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD) menyusun rancangan APBD. Rancangan APBD yang disusun dan diajukan oleh organisasi pemerintah daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup pemerintah daerah yang dituangkan dalam masing-masing Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Anggaran yang disusun dan termuat dalam RKA-SKPD harus mencerminkan anggaran berbasis prestasi kerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai proses penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran merupakan proses akuntansi sekaligus proses manajemen. Dari segi proses akuntansi, penyusunan anggaran merupakan studi terhadap mekanisme prosedur untuk merakit data dan membentuk anggaran. Dari segi manajemen, penyusunan anggaran merupakan proses penetapan peran tiap pimpinan unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu SKPD, perlu melakukan penyusunan anggaran yang sesuai dengan peraturan serta berbasis kinerja. Hal ini dilakukan agar anggaran yang disusun didasarkan pada hasil yang akan dicapai dan sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam kenyataannya, Dispenda Kabupaten Bulukumba dalam proses penyusunan anggarannya senantiasa mengalami keterlambatan-keterlambatan dan kendala-kendala.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, diketahui bahwa penetapan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba, pada Tahun 2006 mengalami keterlambatan dari jadwal yang seharusnya, yang diduga disebabkan oleh banyaknya hambatan yang terjadi di lapangan,

misalnya: terlambatnya unit kerja dalam menyusun RASK, terlambatnya pemeriksaan dan pembahasan oleh Tim Anggaran dan Legislatif.

Secara internal Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar senantiasa mengalami masalah keterlambatan-keterlambatan berupa: (1) penyusunan dan penyerahan RKA yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, (2) jumlah anggaran dalam RKA seringkali tidak mencukupi atau bahkan melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh Panitia Anggaran, serta (3) terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan yang disebabkan oleh masih minimnya kemampuan pegawai dalam proses penyusunan RKA tersebut.

Masalah-masalah di atas dapat terjadi karena beberapa hal antara lain: (1) aturan mengenai pelaksanaan proses anggaran masih sering mengalami perubahan, (2) unsur-unsur yang terkait dengan penyusunan RKA belum cukup bersosialisasi dan berkoneksi dengan aturan-aturan yang ada, (3) kemampuan dan kompetensi pegawai yang masih kurang memadai dalam hal penyusunan RKA, (4) masalah teknis menyangkut perencanaan program dan kegiatan oleh SKPD, (5) sarana dan prasarana dalam proses penyusunan anggaran pada tingkat SKPD kurang memadai, dan (6) faktor politis, berupa keterkaitan dan koneksi SKPD yang satu dengan SKPD lainnya dan DPRD.

Hasil penelitian *Zulkifli Suaib (2007)* tentang Analisis Faktor-faktor

yang Berpengaruh terhadap Penyusunan Rencana Kerja Anggaran pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Ternate Tahun 2006 dan 2007 menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh negatif terhadap penyusunan RKA SKPD di Kota Ternate, diantaranya: jumlah program dan kegiatan, jumlah tenaga kerja, sarana dan prasarana dan tingkat pendidikan pegawai. Sementara itu, hasil penelitian Harriyanto dan Syahrir (2008), Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin tentang Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba: Kasus Penyusunan APBD Tahun 2008 menunjukkan bahwa salah satu masalah terhadap keterlambatan penyusunan APBD Kabupaten Bulukumba selama ini adalah terjadinya ketidakselarasan antara legislatif dan eksekutif terutama penggunaan kekuatan politik dalam penyusunan APBD.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis menetapkan judul penelitian tesis ini sebagai berikut: *Proses dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba.*

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba ?.

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba ?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. *Manfaat Akademik*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan, informasi dan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan aspek manajemen keuangan daerah.

2. *Manfaat Praktis*

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi kepada para perumus dan penentu

kebijakan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bulukumba dalam hubungannya dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi kepada instansi dan dinas terkait yang mengelola proyek yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menggunakan dana yang berasal dari APBD Kabupaten Bulukumba.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi mereka yang berminat terhadap masalah penelitian ini.

E. Lingkup dan Batasan Penelitian

Lingkup dan batasan penelitian ini adalah pada proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) termasuk kinerja yang telah dicapai berdasarkan anggaran berbasis kinerja dengan dasar pada tahun 2005.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Paradigma Anggaran Daerah dalam Konteks Reformasi Anggaran

Orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sedangkan *World Bank* dalam *Mardiasmo (2003)* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Karakteristik pelaksanaan *good governance* menurut UNDP dalam *Mardiasmo (2004)* meliputi:

1. *Participation*, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of Law*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

3. *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan Publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan.
4. *Responsiveness*, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholders.
5. *Consensus Orientation*, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. *Efficiency and Effectiveness*, pengelolaan sumberdaya publik harus dilakukan secara berhasil guna (efisien) dan berdaya guna (efektif).
8. *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. *Strategic vision*, penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Menurut *Mardiasmo (2004)*, dari kedelapan karakteristik itu, setidaknya terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik dan *value of money (economy, efficiency, effectiveness)*.

Lanjut dikemukakan bahwa reformasi manajemen publik terkait dengan perlunya digunakan model manajemen pemerintahan yang baru dan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, karena perubahan tidaklah sekedar perubahan paradigma, Namun juga *New Public Management* yang mengalami beberapa bentuk konsep, misalnya munculnya konsep “*managerialism*”, “*market-based public administration*”, “*post bureaucratic paradigm*” dan “*entrepreneurial government*”. *New Public Management* berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan. Penggunaan paradigma *New Public Management* tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah perubahan pendekatan dalam penganggaran tradisional menjadi anggaran berbasis kinerja, tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (*cost cutting*) dan kompetisi tender (*compulsory competitive tendering contract*) (Mardiasmo (2004)).

Yuwono, Tengku dan Hariyadi (2005), mengemukakan bahwa reformasi keuangan daerah berhubungan dengan perubahan sumber-sumber pembiayaan pemerintah daerah yang meliputi perubahan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah. Dimensi reformasi keuangan daerah tersebut adalah: (1) perubahan kewenangan daerah dalam pemanfaatan dana penimbangan keuangan; (2) perubahan prinsip pengelolaan keuangan;

- (3) perubahan prinsip penggunaan dana pinjaman dan *déficit spending*; dan
- (4) perubahan strategi pembiayaan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (2003), mengemukakan bahwa ruang lingkup) reformasi anggaran meliputi perubahan struktur anggaran (*budget structure reform*) dan perubahan proses penyusunan APBD. Perubahan struktur anggaran dilakukan untuk mengubah struktur anggaran tradisional yang bersifat *line-item* dan *incrementalism*. Perubahan struktur anggaran yang dimaksudkan untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas Publik. Dengan struktur anggaran yang baru tersebut akan tampak secara jelas besarnya surplus dan defisit anggaran serta strategi pembiayaan apabila terjadi defisit fiskal. Format baru APBD tersebut akan memudahkan dalam membuat perhitungan dana pertimbangan yang menjadi bagian daerah. Hal tersebut juga memudahkan bagi Publik untuk melakukan analisis, evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan dan pengelolaan APBD. Pemerintah daerah juga dimungkinkan untuk membentuk dana cadangan. Dengan demikian, anggaran tidak harus dihabiskan selama tahun anggaran bersangkutan, namun bisa transper ke dalam dana cadangan.

Baswir (1997) mengemukakan bahwa Sistem Anggaran Kinerja (*Perfomance Budgeting System*) merupakan penyempurnaan dari sistem anggaran tradisional, jadi pada sistem ini titik Berat pada segi manajemen

anggaran yaitu dengan memperhatikan baik segi ekonomi dan keuangan pelaksanaan anggaran, maupaun hasil fisik yang dicapainya.

Adapun tujuan pengelolaan keuangan daerah menurut *Devas, dkk (1989)* adalah:

1. *Pertanggungjawaban*, yaitu pemerintah daerah harus mampu mempertanggungjawabkan tugas pengelolaan keuangannya kepada lembaga atau individu yang berkepentingan. Lembaga atau individu tersebut dapat berupa: DPRD, Bupati dan masyarakat umum.
2. *Kemampuan finansial*, yaitu pemerintah daerah harus mampu menata keuangannya sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi semua kewajiban keuangannya, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.
3. *Kejujuran*, yaitu pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki itikad baik dan dilakukan sedemikian rupa sehingga mengurangi bahkan menghilangkan kemungkinan terjadinya penyelewengan.
4. *Efektifitas dan efesiensi*, yaitu pengelolaan keuangan daerah harus memungkinkan sebuah program yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah, dijalankan dalam keadaan optimal, berhasil guna dan berdaya guna.

5. Pengendalian, yaitu untuk menjamin bahwa semua tujuan pengelolaan keuangan di atas tercapai dengan baik maka perlu dilakukan pengendalian, baik oleh pemerintah daerah, DPRD maupun pengawas. Untuk menjamin bahwa mereka dapat melakukan pengendalian dengan baik, harus diusahakan agar mereka selalu memperoleh informasi yang dibutuhkan.

B. Konsep Anggaran Pemerintah Daerah

1. Pengertian Anggaran

Pengertian anggaran menurut *Garisson* dan *Noreen* yang diterjemahkan oleh *Santoso (2000)* adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu.

Dan selanjutnya disampaikan bahwa ada beberapa manfaat program penganggaran sebagai berikut:

1. Anggaran merupakan alat komunikasi bagi rencana manajemen melalui organisasi.
2. Proses penganggaran merupakan alat alokasi sumber daya pada berbagai bagian dari organisasi agar dapat digunakan seefektif mungkin.
3. Proses penganggaran dapat mengungkap adanya kemandegan potensial sebelum terjadinya.

4. Anggaran mengkoordinasikan aktivitas seluruh organisasi dengan cara mengintegrasikan rencana dari berbagai bagian.
5. Anggaran menentukan tujuan dan sasaran yang dapat berlaku sebagai benchmark untuk mengevaluasi kinerja pada waktu berikutnya.

Suparmako (1986) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anggaran (*budget*) adalah suatu daftar atau pernyataan yang terinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun.

Selanjutnya dinyatakan bahwa anggaran (*budget*) sebagai suatu rencana rinci yang memperlihatkan bagaimana sumber-sumber daya diharapkan akan memperoleh dan dipakai selama periode tertentu oleh karena itu anggaran merupakan suatu rencana finansial yang dipakai untuk pengelolaan sumber daya organisasi. Defenisi tersebut memberikan pemahaman bahwa anggaran merupakan rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk periode tertentu. Anggaran menggambarkan rencana untuk masa depan yang akan datang, untuk diekspresikan dalam istilah-istilah keuangan yang formal.

Sedangkan *Arsyad (1992)* mengemukakan bahwa anggaran negara pada hakekatnya merupakan rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam satu tahun yang dituangkan dalam angka-angka. Selanjutnya, *Baswir*

(1997) menyatakan bahwa anggaran secara umum dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk satu periode di masa yang akan datang.

Dari defenisi tersebut, maka anggaran secara lebih rinci dapat dikatakan bahwa:

- a. Dengan anggaran negara dapat diketahui tercapai atau tidaknya kebijaksanaan pemerintah di masa yang lalu dan maju atau mundurnya kebijaksanaan yang hendak dicapai pada masa yang akan datang.
- b. Dengan anggaran negara dapat diketahui realisasi pelaksanaan pemerintah di masa yang lalu.
- c. Anggaran negara merupakan gambaran dari kebijaksanaan pemerintah yang dinyatakan dalam ukuran uang, baik kebijaksanaan pemerintah untuk satu periode di masa depan maupun kebijaksanaan penerimaan pemerintah untuk menutup pengeluaran tersebut.

Namun defenisi anggaran yang dibuat oleh *The National Committee on Governmental Accounting* dari Amerika Serikat adalah sebagai berikut:

"A Budget is plan of financial operation emboying an estimated of proposed expenditures for a given period of time and the proposed means of financing them"

Maksudnya adalah suatu anggaran adalah rencana operasional keuangan yang mencakup suatu estimasi pengeluaran untuk suatu jangka

waktu tertentu dan rencana penerimaan pendapatan untuk membiayainya (Gade, 1998).

2. Prinsip Anggaran

Arsyad, dkk (1992) mengemukakan tiga prinsip anggaran yaitu:

- a. *Anggaran Berimbang dan Dinamis*, Berimbang maksudnya jumlah keseluruhan pengeluaran (rutin dan pembangunan), selalu sama dengan jumlah keseluruhan penerimaannya. Dinamis berarti dalam hal ini penerimaan lebih rendah dari yang direncanakan semula, maka pemerintah akan mengurangi pengeluaran agar tetap terjaga keseimbangan. Demikian juga dengan penerimaan, apabila melampaui rencana semula, untuk menjaga keseimbangan pemerintah akan meningkatkan pengeluarannya. Penerapan prinsip ini pada perekonomian berpengaruh terhadap stabilitas (menghindari inflasi), yang diasumsikan banyak tergantung dari tingkat ekspansi dari pengeluaran maupun tingkat kontraksi dari penerimaan.
- b. *Anggaran Defisit*, yaitu apabila pengeluaran pemerintah melampaui pendapatannya, maka pengaruh yang ditimbulkan terhadap perekonomian bersifat ekspansif.
- c. *Anggaran surplus*, yaitu apabila penerimaan pemerintah lebih besar daripada pengeluarannya, maka pengaruh yang ditimbulkan terhadap

kehidupan ekonomi bersifat kontraktif terhadap tenaga kerja produksi daerah dan output.

Selanjutnya dalam *Surat Keputusan Mendagri dan Otoda* tersebut disebutkan bahwa dalam penyusunan APBD hendaknya mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah mensejahterahkan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan

2. Disiplin anggaran

APBD disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, anggaran yang disusun harus dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemilahan antara belanja yang bersifat rutin dengan belanja yang bersifat pembangunan/modal harus diklasifikasikan secara jelas agar tidak terjadi pencampuradukan kedua sifat anggaran yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana.

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.

3. *Keadilan Anggaran*

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. *Efisiensi dan Efektivitas Anggaran*

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu diterapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat

yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang diprogramkan.

5. *Format Anggaran*

Pada dasarnya APBD disusun berdasarkan format anggaran defisit (*deficit budget format*). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Apabila terjadi surplus, daerah dapat membentuk dana cadangan, sedangkan bila terjadi defisit, dapat ditutup melalui sumber pembiayaan pinjaman dan atau penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.

Sedangkan menurut *Mamesah (1995: 82)*, penyusunan APBD perlu ditambah empat prinsip, yaitu:

1. Prinsip kemandirian, dimana adanya usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta adanya upaya ketetapan penggunaan dana yang tersedia agar dapat mengurangi ketergantungan kepada instansi yang lebih tinggi.
2. Prinsip Prioritas, dimana dalam penyusunan anggaran agar diupayakan mempertajam prioritas dalam menggunakan dana.
3. Prinsip Efisiensi dan Efektifitas Anggaran, dimana pengendalian pembiayaan dan penghematan yang menyeluruh pada prioritas daerah.
4. Prinsip Disiplin Anggaran, dimana setiap dinas/lembaga/satuan kerja daerah yang memperoleh anggaran harus dapat menggunakan secara

efisien, tepat guna dan tepat waktu pertanggungjawabannya, serta tidak melaksanakan kegiatan atau proyek yang tidak tersedia/belum tersedia dalam APBD.

Arsyad (1992) mengemukakan bahwa bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia, prinsip anggaran defisit lebih dapat diterapkan karena akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah memegang peranan penting melalui kebijaksanaan anggaran di daerah (APBD) yang salah satu tujuan utamanya adalah untuk menjamin agar laju pertumbuhan ekonomi dapat sesuai dengan potensinya. Pengeluaran negara (anggaran belanja rutin dan pembangunan) selalu didasarkan atas penentuan kebutuhan rutin pemerintah, pertimbangan stabilitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan jangka pendek yang tumbuh karena pertumbuhan keadaan negara dan masyarakat juga dimaksudkan untuk usaha-usaha pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada umumnya.

C. Konsep Anggaran Pemerintah Daerah (APBD)

Penyusunan anggaran pemerintah daerah (APBD), tidak terlepas dari pelaksanaan salah satu fungsi organik manajemen yaitu perencanaan. Sebagai salah satu fungsi organik manajemen selayaknya apabila setiap pemerintah daerah yang menginginkan tercapainya tujuan secara berdayaguna dan berhasilguna melaksanakan perencanaan ini dengan

sebaik-baiknya, baik daerah tingkat I (propinsi) maupun daerah tingkat II (kabupaten/kota) (*Karyoso, 2005: 31*).

Selanjutnya dikemukakan bahwa dalam kegiatan perencanaan terhadap ide pokok antara lain: (1) perencanaan pada hakekatnya merupakan kegiatan berpikir karena merencanakan memang didahului oleh konseptualisasi usaha sebelum bertindak, dan (2) perencanaan pada dasarnya merupakan kegiatan pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang dilaksanakan di masa depan.

Ada beberapa rumusan tentang pengertian perencanaan terutama dengan fungsinya, sebagai berikut: (1) perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, (2) perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada secara lebih efisien dan efektif, (3) perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai (dilakukan) bagaimana, bilamana, dan oleh siapa, (4) perencanaan adalah melihat ke masa depan dengan menentukan pilihan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan, dan (5) perencanaan adalah suatu proses kegiatan yang terus menerus dan menyeluruh dari penyusunan suatu rencana, penyusunan program kegiatan dan pelaksanaan (implementasi) (*Abe, 2002: 30*).

Uraian di atas berkaitan erat dengan perencanaan anggaran pemerintah daerah (APBD), dimana APBD sebagai rencana kegiatan tahunan pemerintah daerah baik rutin maupun pembangunan sekaligus perumusan awal tentang perkiraan jumlah penerimaan dan sumber-sumber pendapatan daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran tertentu.

Anggaran pemerintah daerah atau lebih dikenal dengan APBD menurut *Mamesah (1995)* adalah rencana operasional keuangan daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

Sebagai suatu kesatuan dokumen APBD yang merupakan rangkuman seluruh jenis belanja dan sumber-sumber pembiayaan, *Mamesah (1995: 97)* mengemukakan defenisi APBD sebagai berikut:

- A** = Anggaran, dalam arti *beg rooting* atau estimate yang memiliki makna penentuan, patokan atau penerapan banyaknya uang.
- P** = Pendapatan atau *income* dalam arti *revenue* atau penerimaan, dimaksudkan dengan adanya PADI berupa pajak, retribusi, dan lain-lain.
- B** = Belanja atau *government expenditure* atau pengeluaran yang dimaksudkan dalam pemerintahan daerah untuk melaksanakan

tugas dan fungsinya memerlukan pengeluaran sumber daya ekonomi berupa uang atau dinyatakan dengan penggunaan uang untuk keperluan belanja rutin dan pembangunan atau sekarang dikenal dengan belanja operasional dengan belanja modal.

D = Daerah, dimaksud disini yaitu sebagai daerah otonom (dalam hal ini provinsi, kabupaten/kota) yang menjadi alat kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan di daerah.

Menurut *Yuwono, Tengku dan Hariyadi (2005: 94)*, APBD merupakan dokumen yang mencerminkan kondisi keuangan dari pemerintah daerah, didalamnya meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan. Melalui suatu analisis, APBD juga dapat menggambarkan rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan otonomi daerah yang mensyaratkan pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengelola keuangannya secara mandiri.

APBD di masing-masing daerah mempunyai masa tahun anggaran yang sama yakni 1 tahun takwin, 1 januari sampai 31 desember. Anggaran yang disusun ini berdasarkan basis prestasi (*performance basis*) yang disesuaikan dengan perencanaan fiskal dan sistem penyusunan anggaran tahunan serta diselaraskan sesuai dengan kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure frame work*) (*Barata dan Bambang, 2004*).

Lebih lanjut dikemukakan bahwa penyusunan rencana anggaran pembangunan salah satu kegiatannya adalah identifikasi kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan serta mempertimbangkan kebijaksanaan menyangkut pengalokasian pada program-program yang dihubungkan baik dengan tujuan perekonomian secara keseluruhan maupun sarana-sarana spesifik sektoral dan regional tertentu.

Berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran, *Dobell dan Ulrich (2002: 1-24)* mengemukakan bahwa anggaran merupakan alat utama pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji dan kebijakannya ke dalam rencana-rencana konkrit dan terintegrasi dalam hal tindakan apa yang akan diambil, hasil apa yang akan dicapai, pada biaya berapa dan siapa yang akan membayar biaya-biaya tersebut.

Sedangkan *Kunarjo (1993)* menyatakan bahwa penyusunan anggaran pemerintah daerah (APBD) mempunyai fungsi utama, yaitu: (1) *fungsi alokasi*, dimaksud untuk penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat akan sarana dan prasarana yang tidak mungkin disediakan oleh swasta atau saling melengkapi antara pemerintah dan swasta, (2) *fungsi distribusi*, adalah anggaran yang menyangkut kebijaksanaan pemerintah dalam masalah pemerataan pendapatan antar warga negara agar kesenjangan dan penerimaan pendapatan dapat dikurangi, dan (3) *fungsi stabilisasi*, adalah anggaran yang menyangkut masalah terpeliharanya tingkat kesempatan kerja

yang tinggi, kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai.

Lebih lanjut *Kunarjo (1996)* menyatakan bahwa APBD dalam konteks sebagai salah satu fungsi anggaran daerah dalam proses pembangunan adalah sebagai instrumen kebijakan fiskal yaitu dengan mengubah prioritas dan besar alokasi dana APBD, kemudian digunakan mendorong, memberikan fasilitas serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 16 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda). Lanjut dikemukakan bahwa APBD terdiri dari: (1) *Pendapatan Daerah*, adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Jadi pendapatan daerah secara lebih luas dapat didefinisikan sebagai semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah, yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, (2) *Belanja Daerah*, adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah ini dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.

Belanja daerah ini dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja, dan (3) Pembiayaan, pembiayaan dalam APBD atau disebut pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

APBD sebagai suatu salah satu bentuk pengelolaan keuangan daerah oleh *Devas dkk (1987: 279)* mengemukakan bahwa tujuan utama pengelolaan keuangan daerah adalah: (1) tanggung jawab, (2) memenuhi kewajiban keuangan, (3) kejujuran, (4) hasil guna dan daya guna, dan (5) pengendalian. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, yang meliputi DPRD dan masyarakat.

Selanjutnya, asas umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam bagian kedua, pasal 16 *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, adalah: (1) APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, (2) penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, dan (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda.

Beberapa prinsip pokok dalam siklus anggaran daerah menurut *Mardiasmo (2000: 1-3)* sebagai bagian integral dari elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi: (1) akuntabilitas keuangan daerah, yaitu kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, (2) *value for money*, kinerja anggaran pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus dapat memanfaatkan uang sebaik mungkin dengan konsep *value for money* yang berorientasi kepada kepentingan publik, (3) kejujuran, pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan, dan (4) transparansi, keterbukaan pemerintah adalah membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat dan DPRD yang pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dan masyarakatnya.

D. Proses Penyusunan APBD

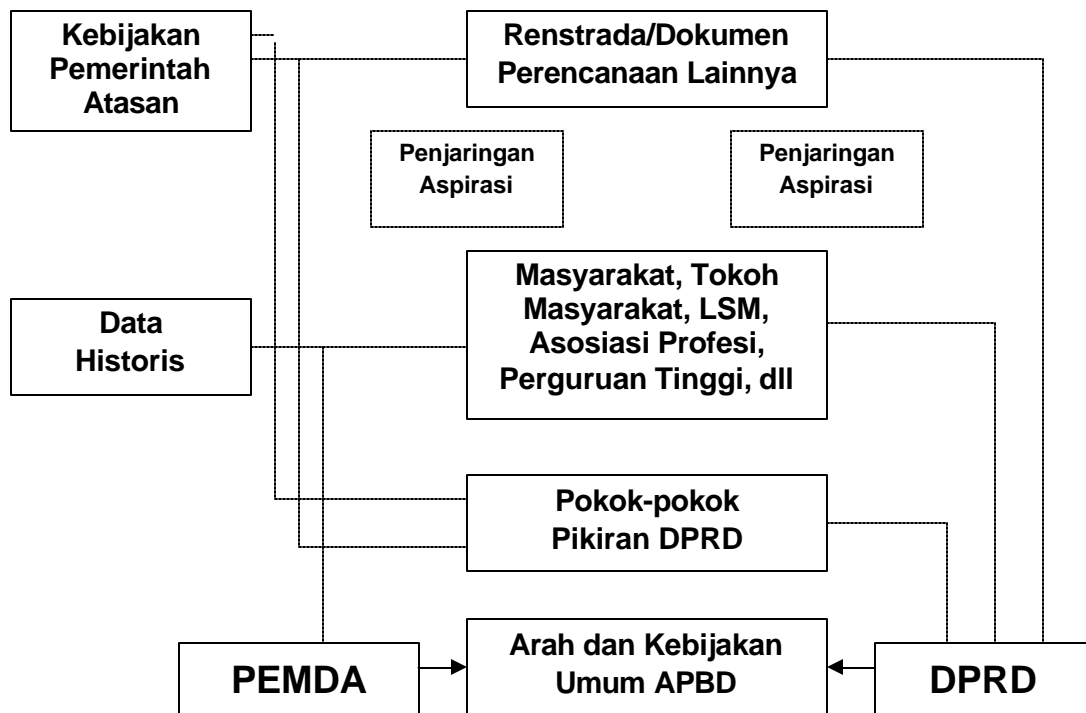
Proses penyusunan APBD diawali dengan penyusunan rancangan APBD yang secara keseluruhan mencakup penyusunan arah dan kebijakan umum APBD sampai dengan disusunnya rancangan APBD. Penyusunan rancangan APBD dengan pendekatan kinerja mencakup 2 (dua) hal yaitu: (1) penyusunan rancangan anggaran setiap unit organisasi perangkat daerah, dan (2) penyusunan anggaran APBD pemerintah daerah oleh Tim Anggaran Eksekutif.

Mekanisme penyusunan anggaran daerah menurut *Mardiasmo (2002)* terdiri dari serangkaian tahapan aktivitas sebagai berikut: (1) penyusunan arah dan kebijakan umum APBD, (2) penyusunan strategi dan prioritas APBD, (3) penyusunan rencana program dan kegiatan, (4) penerbitan surat edaran, (5) penyusunan pernyataan anggaran, dan (6) penyusunan rancangan anggaran daerah.

Dalam *Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002* disebutkan mengenai tahap-tahap dalam proses penyusunan rancangan APBD sebagai berikut:

1. Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun dan menyepakati arah dan kebijakan umum APBD. Penyusunan arah dan kebijakan umum APBD berpedoman pada Rencana Strategi Daerah (Renstrada) atau dokumen perencanaan lainnya, penjaringan aspirasi masyarakat, laporan kerja

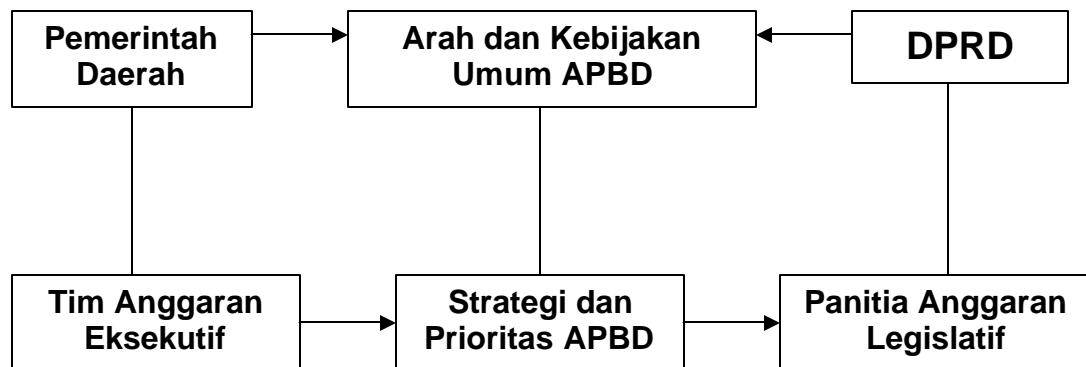
tahun anggaran sebelumnya, pokok-pokok pikiran DPRD serta pokok-pokok kebijakan keuangan daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Proses penjaringan aspirasi masyarakat dapat dimulai pada bulan Mei dan kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD mengenai arah dan kebijakan umum APBD dilaksanakan pada bulan Juni-Juli.



Gambar 1: Mekanisme Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD

2. Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD, pemerintah daerah menyusun strategi dan prioritas APBD. Proses penyusunan strategi dan

prioritas APBD dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus (termasuk konfirmasi rumusan strategi dan prioritas APBD kepada DPRD).



Gambar 2: Mekanisme Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD

3. Kepala Daerah menerbitkan surat edaran dan disampaikan kepada setiap unit kerja untuk dasar penyusunan rancangan anggaran unit kerja. Proses tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus – September.
4. Penyusunan rancangan anggaran unit kerja yang dituangkan dalam pernyataan anggaran, pengajuan PA kepada Tim Anggaran Eksekutif, evaluasi PA dan penyusunan rancangan APBD dilaksanakan pada bulan September – Oktober.
5. Pengajuan rancangan APBD kepada DPRD dan pembahasan Rancangan APBD antara Tim Anggaran Eksekutif dengan Panitia Anggaran Legislatif dilaksanakan pada bulan Oktober – Nopember.

6. Penyampaian rancangan APBD pada sidang paripurna DPRD dan penetapan Rancangan APBD menjadi APBD dilaksanakan pada bulan Desember.

Selanjutnya, *Elim (2002: 39)* mengemukakan 7 (tujuh) tahap proses penyusunan APBD, yaitu: (1) perumusan kebijakan umum APBD antara pemerintah daerah dan DPRD, (2) penyusunan strategi pola prioritas oleh pemerintah daerah, (3) penyusunan RAPBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah, (4) pembahasan RAPBD dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD, (5) penetapan APBD dengan Perda, (6) apabila DPRD tidak menyetujui RAPBD yang diusulkan, maka dipergunakan APBD tahun sebelumnya, dan (7) perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan.

E. Proses Penyusunan Anggaran pada Unit Organisasi

Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK) merupakan dokumen yang memuat rancangan anggaran unit kerja sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. Berdasarkan Rencana Anggaran Satuan Kerja yang disampaikan oleh setiap unit kerja, Tim Anggaran Eksekutif mengevaluasi dan menganalisis hal-hal sebagai berikut: (1) kesesuaian antara rancangan anggaran unit kerja dengan program dan kegiatan yang direncanakan unit kerja, (2) kesesuaian program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan

fungsi unit kerja, dan (3) kewajaran antara anggaran dengan target kinerja berdasarkan SAB (standar analisis belanja) yang telah diperhitungkan.

Rencana Anggaran Satuan Kerja memuat informasi mengenai unit kerja, antara lain mengenai: (1) Visi dan Misi, (2) Tujuan dan Sasaran, (3) Tugas Pokok dan Fungsi, (4) Bidang, Program dan Kegiatan, dan (5) Anggaran.

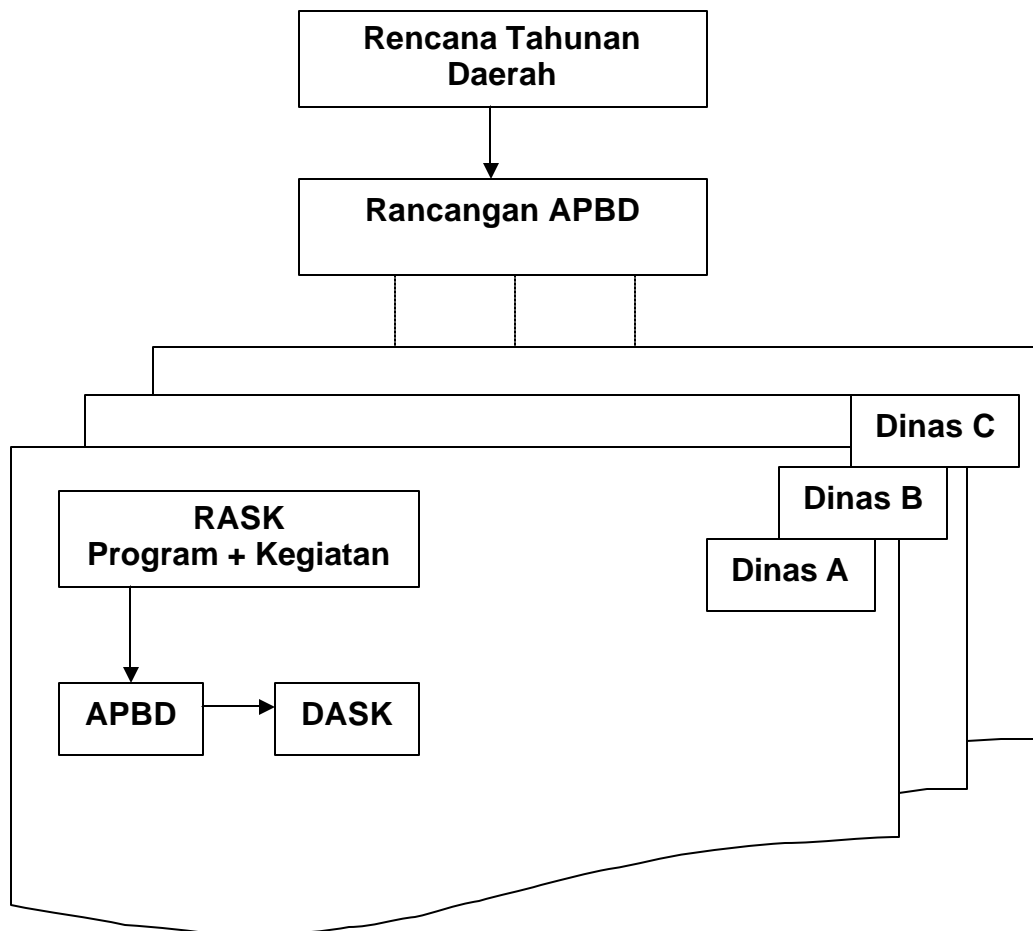
Sesuai dengan informasi yang dimuat, format formulir Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) secara garis besar terdiri atas 3 (tiga) bagian sebagai berikut:

Tabel 1.
Bagian-bagian pada Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)

Kode	Informasi Pokok
S1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Tupoksi Unit Kerja
S2	Bidang, Program dan Kegiatan
S3	Anggaran

Sumber: Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002

Adapun proses perencanaan di satuan kerja, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



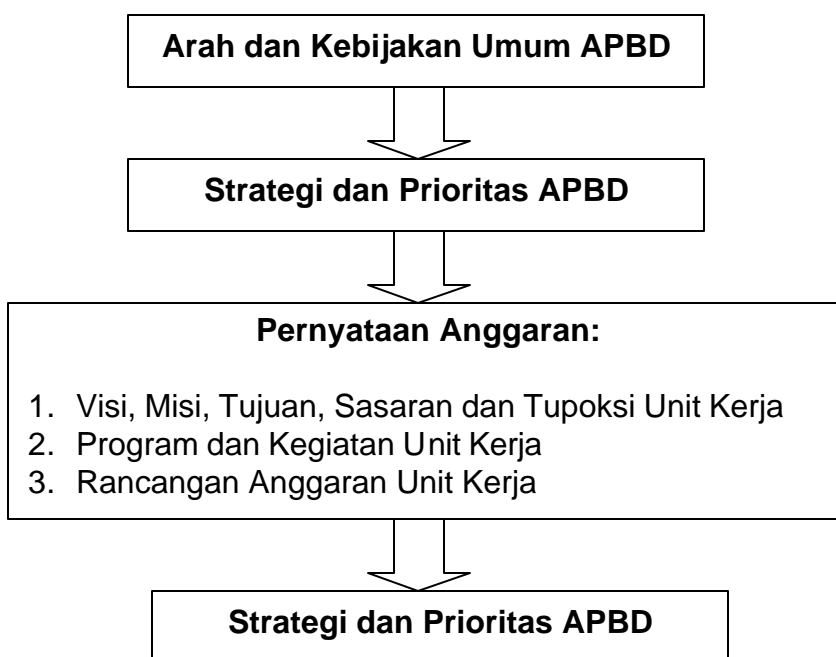
Gambar 3: Proses Perencanaan Anggaran pada Satuan Kerja

F. Penyusunan Rancangan APBD oleh Tim Anggaran Eksekutif

PA yang memuat rancangan anggaran unit kerja disampaikan kepada Tim Anggaran Eksekutif untuk dievaluasi. PA dapat dikembalikan kepada unit kerja, jika menurut hasil evaluasi Tim Anggaran Eksekutif perlu dilakukan revisi, perubahan atau penyempurnaan. Hasil evaluasi rancangan anggaran yang diusulkan setiap unit kerja dalam PA selanjutnya oleh Tim Anggaran

Eksekutif digunakan sebagai dasar menyusun Rancangan APBD. Rancangan APBD pada dasarnya merupakan gabungan dari gabungan unit kerja.

Rancangan APBD oleh Pemerintah Daerah diajukan kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan dan ditetapkan sebagai APBD dalam tahun anggaran yang akan datang. Tahap-tahap dalam proses penyusunan rancangan APBD dapat dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 4: Proses Penyusunan Rancangan APBD

Adapun bagan penyusunan APBD secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini:

G. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Penyusunan Anggaran

Terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap proses penyusunan anggaran baik pada tingkat SKPD maupun pada tingkat pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut berupa faktor kualitas dan kuantitas SDM, faktor dukungan sarana dan prasarana, faktor teknis berupa kompleksitas (jumlah) program dan kegiatan dan sistem RKA yang ada, faktor politis (kebijakan), dan faktor-faktor lainnya.

Agar penelitian ini memiliki fokus yang jelas terutama menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba, maka penulis mengidentifikasi beberapa faktor yang dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

1. Kualitas (Kompetensi) dan Jumlah SDM

Zainun (1995: 43) mengemukakan bahwa sumber daya manusia yang bermutu dalam arti yang sebenarnya adalah kerja yang dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang memang dikehendaki dari pekerjaan tersebut. Bermutu (berkualitas) bukan hanya pandai tetapi memenuhi semua syarat kualitatif yang dituntut pekerjaan itu sehingga pekerjaan itu dapat benar-benar diselesaikan menurut yang dikehendaki.

Namun demikian, disamping kualitas (kompetensi) SDM juga sangat dibutuhkan kuantitas (jumlah) tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan tanggung jawab (pekerjaan) tertentu. Oleh karena itu, kinerja organisasi merupakan total output dari kinerja pegawai yang ada didalamnya yang dapat dinilai dari segi kualitas (kompetensi) dan kuantitas SDM dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Dalam proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba terutama dalam proses perencanaan, penyusunan dan penetapan anggaran senantiasa membutuhkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini mengingat bahwa dalam proses perencanaan, penyusunan, dan penetapan anggaran merupakan satu kesatuan dengan perencanaan, penyusunan dan penetapan program dan kegiatan dari SKPD tersebut. Dalam proses perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan yang kemudian berimplikasi terhadap besaran anggarannya suatu organisasi harus senantiasa melakukannya melalui proses *bottom up planning*.

2. *Dukungan Sarana dan Prasarana*

Dukungan sarana dan prasarana dalam organisasi dikemukakan oleh *Moenir (1995: 119)* yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana sangat penting karena: (a) mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu, (b) meningkatkan produktivitas, (c) kualitas kerja

lebih baik dan terjamin, (d) ketetapan suasana dan stabilitas, (e) lebih mudah dalam gerak para pelakunya, (f) menimbulkan rasan kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan, dan (g) menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang berkepentingan sehingga dapat mengurangi sifat emosionalnya sendiri.

Kahor (1992: 184) mengatakan bahwa faktor sarana dan sarana yang diartikan sebagai peralatan sangat penting dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintah. Hal ini sejalan dengan pendapat *Soedjadi (1995: 69)* bahwa peralatan kerja atau sarana penunjang dalam hal ini termasuk dalam pengertian sarana dan prasarana merupakan bagian penting dan ikut menentukan terselenggaranya proses penyusunan APBD.

Dalam *Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah*, ditegaskan bahwa sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain: ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.

Sarana dan prasarana penunjang kerja bisa meliputi ketersediaan, kuantitas dan kualitas. Sarana dan prasarana kerja bagi organisasi dimaksudkan dan ditujukan untuk: (a) kelancaran proses pekerjaan, (b) kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai, (c) memudahkan komunikasi, (d) kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan, (e) memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi, (f) keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani, (g) keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur, (h) cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam, (i) penataan yang bernilai estetika, (j) kesejahteraan pegawai, dan (k) kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

3. Kompleksitas (Jumlah) Program dan Kegiatan

Untuk mendapatkan kinerja yang optimal dalam proses penyusunan anggaran pada setiap SKPD, harus dikorelasikan dengan beban kerja organisasi dan beban kerja individu pegawai dalam organisasi tersebut. Hal ini akan sangat penting mengingat dalam proses penyusunan anggaran

sangat berkaitan dengan kompleksitas (jumlah) program dan kegiatan yang direncanakan yang dalam pelaksanaannya akan melibatkan kualitas dan kuantitas pegawai sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan anggaran, program dan kegiatan harus berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi organisasi. Secara struktural organisasi dan semua elemen termasuk individu pegawai dalam organisasi harus terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan dan penetapan anggaran, program dan kegiatan organisasi.

H. Kerangka Pikir

Peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa penyusunan APBD dilakukan dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja (*performance budgeting*).

Anggaran yang disusun berdasarkan prestasi kerja (kinerja) yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Dalam pendekatan kinerja ini, ada dua hal yang ditekankan yaitu output dan input. Output (keluaran) menunjukkan barang dan jasa yang dihasilkan dari program dan kegiatan sesuai dengan input yang digunakan. Input (masukan) adalah besarnya sumber-sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan suatu program dan

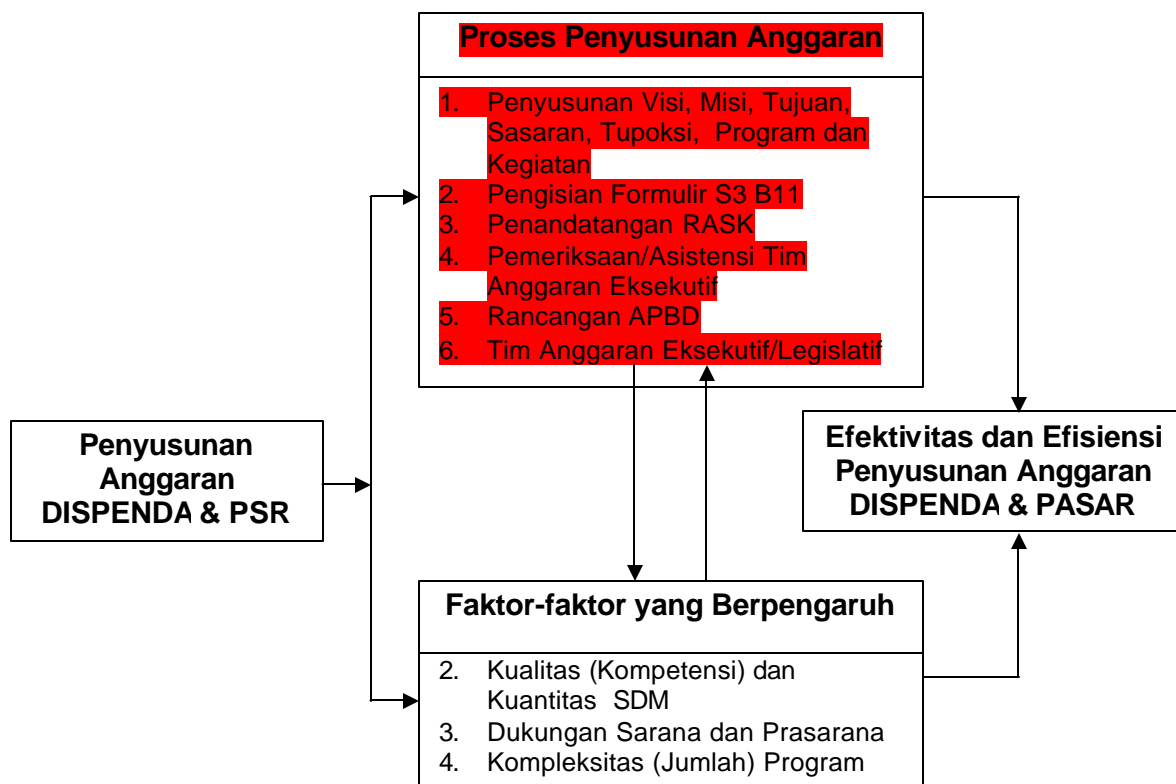
kegiatan. Dalam hal ini, setiap penggunaan sumber-sumber yang direncanakan dalam APBD dikaitkan dengan barang dan jasa yang akan dihasilkan. Hubungan antara masukan dan keluaran tersebut menunjukkan kinerja suatu program atau kegiatan.

Program atau kegiatan yang dianggarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar sebagai suatu SKPD merupakan usulan program atau kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan SKPD lain. Proses penyusunannya juga disesuaikan dengan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bulukumba.

Proses penyusunan RASK pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar cenderung tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, yang disebabkan oleh keterlambatan unit kerja dalam proses penyusunannya. Hal ini berimplikasi pada terhambatnya penetapan anggaran program sehingga pencapaian kinerja Dispenda menjadi tidak optimal yang ditandai dengan terlambatnya pelaksanaan program yang disertai dengan terjadinya kecenderungan pelaksanaan program yang terburu-buru, sehingga capaian indikator kinerja tidak efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian proses penyusunan anggaran dengan peraturan dan pencapaian kinerja. Oleh karena itu, kajian terhadap proses penyusunannya adalah hal yang mutlak dilakukan. Adapun tolak ukur kinerja program atau kegiatan yang

diusulkan Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar sebagai suatu SKPD selama 1 tahun anggaran dapat dikembangkan dari penilaian terhadap input-output menjadi *input-output-outcome-benefit-impact*. *Benefit* pada dasarnya merupakan *outcome* jangka menengah dan *impact* merupakan *outcome* jangka panjang. Untuk lebih jelasnya, kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 6: Kerangka Pikir Penelitian Proses dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba

I. Hipotesis

1. Diduga terdapat pengaruh kualitas (kompetensi) dan kualitas SDM terhadap proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba.
2. Diduga terdapat pengaruh dukungan sarana dan prasarana terhadap proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba.
3. Diduga terdapat pengaruh kompleksitas (jumlah) program dan kegiatan terhadap proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan penyusunan anggaran. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan mulai pada bulan Desember 2006 sampai dengan Maret 2007.

B. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan (metode) yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode survei yang dilakukan melalui usaha pengamatan untuk memperoleh data dan informasi serta fakta-fakta tentang fenomena yang menyangkut proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba. Metode penelitian survei dipilih karena metode ini relevan dengan materi penulisan tesis ini. Disamping itu, karena penelitian yang dilakukan ini hanya bersifat deskriptif yaitu menggambarkan apa adanya dari kejadian yang diteliti.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai (PNS dan pegawai kontrak) pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten

Bulukumba yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan penyusunan anggaran. Jumlah pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba sebanyak 138 orang.

Adapun teknik penarikan sampel terhadap populasi dilakukan melalui metode penarikan sampel melalui sampel acak sederhana (*simple random sampel*). Berdasarkan metode penarikan sampel tersebut, maka jumlah sampel ditetapkan sebanyak 100 orang. Penetapan metode penarikan sampel ini didasarkan pada pertimbangan bahwa populasi dan masalah yang diteliti dalam penelitian ini bersifat homogen.

D. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat tidak semua fenomena dalam obyek penelitian ini memiliki sifat transparan, maka pemilihan teknik pengumpulan data perlu mempertimbangkan kemampuan penjangkauan data yang valid, akurat dan dapat dipercaya. Untuk mendapatkan data yang diperlukan tersebut dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. *Daftar Pertanyaan (Kuesioner)*

Teknik ini dilakukan melalui penyebaran daftar pertanyaan (kuesioner/angket) kepada setiap responden yang telah ditetapkan.

2. *Pengamatan (Observasi)*

Teknik ini dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan mengenai berbagai fenomena yang tampak

secara obyektif yaitu proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.

3. *Wawancara (Interview)*

Teknik ini dimaksudkan agar data yang terkumpul diharapkan dapat melengkapi data-data dan fenomena yang diobservasi dan diajukan kepada informan terpilih yang umumnya berasal dari kalangan responden itu sendiri sebagai informan kunci.

4. *Dokumentasi*

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang telah ada pada instansi (lokus penelitian) yang terkait dengan masalah penelitian.

E. Metode Analisis Data

Menurut *Moelong (2001)*, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga tema dapat ditemukan untuk kemudian dirumuskan.

Untuk menganalisis proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui:

1. *Deskripsi Informasi*, dilakukan dengan cara mendeskripsikan pernyataan langsung informan. Kegiatan tersebut dilakukan setelah diadakan observasi dan wawancara.

2. *Kategorisasi Data*, dilaksanakan melalui pemisahan data ke dalam bagian-bagian yang sejenis. Hal ini dimaksudkan agar data terkelompok/terklasifikasi sesuai dengan masalah penelitian, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.
3. *Abstraksi Data*, setelah data dikumpulkan, dikelompokkan dan disusun, maka dilakukan proses transformasi data. Data yang telah dikumpulkan, dikelompokkan dan disusun tersebut diolah sesuai dengan tuntutan masalah penelitian.
4. *Pengujian Data*, langkah selanjutnya setelah abstraksi data adalah dengan menguji kembali data yang telah disusun sebelumnya. Langkah ini dimaksudkan untuk menjamin kevalidan data dan menghindari tidak tercakupnya seluruh data dalam penyusunan data.
5. *Penarikan Kesimpulan*, setelah dilakukan pengujian kembali terhadap data, kemudian data tersebut dianggap sudah representatif untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam rumusan masalah, maka langkah terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan. Agar penarikan kesimpulan tersebut tidak mengalami pembiasan, maka penarikan kesimpulan tersebut harus dimurni didasarkan pada hasil penelitian.

Sedangkan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar

Kabupaten Bulukumna digunakan analisis statistik deskriptif (analisis kuantitatif) dengan analisis *Regresi Berganda*. untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas (X_1 , X_2 , dan X_3 ,) yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran yang terdiri atas sub variabel kualitas (kompetensi) dan jumlah SDM, dukungan sarana dan prasarana dan kompleksitas (jumlah) program dan kegiatan terhadap variabel terikat (Y) yaitu proses penyusunan anggaran, maka digunakan teknik regresi berganda dengan hipotesis statistik, taraf signifikansi, kriteria penerimaan hipotesis dan rumus sebagai berikut:

1) Hipotesis statistik : $H_0 : \beta X_1, X_2, X_3, = 0$

$H_1 : \beta X_1, X_2, X_3, \neq 0$

2) Taraf Signifikansi: $\alpha = 0,05$

3) Kriteria penerimaan hipotesis :

Terima H_0 atau tolak H_1 bilamana signifikan $F > \alpha = 0,05$

Terima H_0 atau tolak H_1 bilamana signifikan $F < \alpha = 0,05$

H_0 diterima: tidak ada pengaruh variable bebas terhadap variabel terikat.

H_1 diterima : ada pengaruh variable bebas terhadap variabel terikat.

4) Rumus: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$.

Dimana:

Y = Penyusunan Anggaran

a = Konstanta atau Bilangan Harga x = 0

- b = Koefisien Regresi
- x_1 = Kualitas/Kuantitas SDM
- x_2 = Dukungan sarana dan prasarana
- x_3 = Kompleksitas (Jumlah) Program dan Kegiatan

F. Defenisi Operasional Variabel

Untuk memberikan pemahaman tentang variabel dalam penelitian ini, maka diberikan beberapa defenisi operasional sebagai berikut:

1. Proses penyusunan anggaran yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba, dengan indikator:
 - a. Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Tugas Pokok dan Fungsi, Program dan Kegiatan
 - b. Pengisian Formulir S3 B11 oleh Seksi2
 - c. Penandatanganan RASK oleh Kepala Dinas
 - d. Pemeriksaan/Asistensi Tim Anggaran Eksekutif
 - e. Rancangan APBD
 - f. Tim Anggaran Eksekutif/Legislatif
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba, dengan indikator:
 - a. Kualitas (Kompetensi) dan Kuantitas SDM

- b. Dukungan Sarana dan Prasarana
- c. Kompleksitas (Jumlah) Program dan Kegiatan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis dan Demografis

Kabupaten Bulukumba dengan ibukota Bulukumba adalah wilayah yang terletak di bagian selatan jajah Sulawesi berjarak kurang lebih 153 kilometer dari ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Terletak antara $05^{\circ}2'$ – $05^{\circ}40'$ lintang selatan dan $119^{\circ}58'$ – $120^{\circ}38'$ bujur timur. Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai disebelah utara teluk Bone disebelah timur laut Flores disebelah selatan dan kabupaten Bantaeng disebelah barat.

Luas wilayah kabupaten Bulukumba adalah $1.154.67 \text{ km}^2$ atau sekitar 1,85 % dari luas wilayah Sulawesi Selatan yang meliputi sepuluh kecamatan dan terbagi dalam 101 desa dan 24 kelurahan. Ditinjau dari segi luas kecamatan, Gangking dan Bulukumpa merupakan dua wilayah kecamatan terluas yaitu masing-masing memiliki luas $173,52 \text{ km}^2$ dan $171,33 \text{ km}^2$ atau sekitar 29,87% dari luas kabupaten Bulukumba. Sedangkan Kecamatan Ujung bulu merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah yang terkecil dari sepuluh kecamatan yaitu hanya $14,4 \text{ km}^2$ atau sekitar 1,25 % dari luas keseluruhan kabupaten Bulukumba.

Wilayah kabupaten Bulukumba umumnya atau 95 persen berada pada ketinggian antara 0 - 1000 meter di atas permukaan laut dengan tingkat

kemiringan tanah umumnya antara 0-40⁰. Terdapat 25 aliran sungai sepanjang 481,25 km yang dapat mengairi sawah seluas 19.531 hektar sehingga merupakan daerah yang sangat potensial untuk pertanian. Curah hujan di kabupaten bulukumba cukup tinggi yaitu rata-rata diatas 1000mm per tahun dengan rata-rata sepuluh hari hujan per bulan.

Jumlah penduduk kabupaten Bulukumba pada tahun 2005 adalah 379.411 jiwa dengan perbandingan antara laki-laki dan perempuan yaitu 179.938 dan 199.473 jiwa tersebar di sepuluh kecamatan dengan laju pertumbuhan 1,74 persen per tahun dan kepadatan penduduk berada pada kisaran 329 orang per km².

Penduduk usia kerja pada tahun 2005 di kabupaten ini berjumlah 301.762 jiwa yang terdiri dari 161.797 perempuan dan 139.935 jiwa laki-laki. Dari seluruh penduduk usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja (hasil susenas 2005 dan data dari Dinas Sosial dan Linmas) berjumlah 187.186 jiwa atau sama dengan 62 persen dari seluruh penduduk usia kerja. Dari jumlah ini tercatat 9.440 orang dalam status mencari pekerjaan atau dengan kata lain tingkat pengangguran di kabupaten Bulukumba pada tahun yang sama adalah 5,4 persen. Angka ini merupakan rasio antara pencari kerja dan jumlah angkatan kerja.

2. Keadaan Perekonomian Daerah (Pertumbuhan PDRB dan Keuangan Daerah)

Selama kurun waktu 2002-2006 perekonomian kabupaten Bulukumba menunjukkan peningkatan yang cukup baik walaupun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan produk domestik bruto pada tahun 2002 (PDRB) atas harga berlaku sebesar 1.312.524,56 dan atas dasar harga konstan sebesar 1.121.407,28 sampai pada Tahun 2006 menjadi sebesar 1.976.249,22 dan 1.352.303,09 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 10,67 persen dan 4,62 persen. Sektor pertanian masih mendominasi perekonomian kabupaten Bulukumba karena sektor ini merupakan sektor unggulan dan memiliki peranan yang lebih besar dari sektor usaha lainnya termasuk didalamnya penyerapan tenaga kerja.

Seiring dengan pertumbuhan PDRB, maka PDRB per kapita di kabupaten Bulukumba juga mengalami perkembangan yang cukup baik yakni mengalami pertumbuhan hampir dua kali lipat yaitu sejumlah Rp.3.691.761 pada tahun 2002 menjadi Rp.5.148.225 pada tahun 2006.

Sementara itu, kebijakan umum anggaran dibidang pendapatan diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan potensi dan kewenangan yang didukung sumberdaya aparat pengelola pendapatan daerah dan dasar hukum yang melandasinya. Apabila dalam peraturan daerah tentang pajak

dan retribusi daerah bertentangan dengan peraturan yang di atasnya maka akan dilakukan revisi terhadap peraturan tersebut. Intinya bahwa kebijakan pendapatan asli daerah tidak memberatkan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Penerimaan pendapatan tetap memperhatikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan umum penganggaran dibidang pendapatan PAD diarahkan pada keakuratan perencanaan perhitungan target penerimaan, disamping mengoptimalkan penggalian potensi sumber-sumber PAD sehingga intensifikasi, ekstensifikasi dan identifikasi sumber PAD akan diupayakan secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang.

Pendapatan daerah dapat membangun kapasitas fiskal daerah yaitu kemampuan untuk membelanjai berbagai kegiatan baik dalam rangka menjalankan pemerintahan dan pelayanan public. Pendapatan daerah dapat dibedakan atas pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah serta penerimaan dari hasil penyelenggaraan asset daerah yang dipisahkan maupun badan-badan layanan umum daerah. Penerimaan lainnya adalah transfer dari pemerintah dan pemerintah provinsi dalam bentuk bagi hasil pajak, sumberdaya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Perkembangan penerimaan daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun. PAD yang pada tahun 2004 hanya mencapai Rp.12,96 milyar meningkat terus dan mencapai Rp. 22,06 milyar pada tahun 2007. Dana perimbangan adalah komponen yang paling besar dari total penerimaan daerah. Pada tahun 2004 komponen terbesar tersebut mencapai Rp.212,1 milyar dan pada tahun 2007 realisasinya mencapai Rp.404 milyar dalam 4 tahun perubahannya cukup pesat hampir mencapai 2 kali lipat.

Dua komponen pendapatan tersebut yang sangat penting. PAD adalah penerimaan daerah yang menentukan kapasitas fiskal daerah, tetapi sekaligus dapat merupakan rujukan tentang ekonomi daerah. Ketika ekonomi daerah membaik sektor-sektor usaha member kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Demikian pula Dana Perimbangan, ketika perekonomian nasional dan daerah membaik maka konsekuensinya pendapatan dana transfer juga akan membaik.

Dalam rangka memacu peningkatan fiskal daerah, diperlukan upaya untuk memajukan ekonomi daerah, bukan dengan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang cenderung dapat mengakibatkan perekonomian biaya tinggi di daerah. Oleh karena itu untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah maka upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah adalah: (a) meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan public, (b) meningkatkan pembinaan personil, pengaturan, pengendalian

terhadap pelaksanaan penarikan sumber-sumber pendapatan asli daerah, (c) meningkatkan peran investasi pemerintah untuk mendorong berkembangnya investasi publik, dan (d) meminimalisasi tingkat kebocoran terhadap pemungutan PAD.

Sementara itu, belanja daerah diarahkan pada penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta peningkatan produksi pertanian. Perencanaan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

B. Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba

Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2000 Tanggal 23 Desember 2000 dan Keputusan Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor 121-VI-2001 Tanggal 17 Juni 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba. Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam struktur

organisasinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bulukumba.

1. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan Struktur Organisasi

Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang Pengembangan Otonomi Daerah yang menjadi tanggung jawabnya meliputi: perencanaan, penagihan, penelitian, pembukuan, penyuluhan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah.

Berdasarkan tugas pokok di atas, Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba menjalankan fungsi: (1) pembinaan umum di bidang pendapatan daerah, (2) pembinaan teknis pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan, pembukuan dan pelaporan, perencanaan dan pengendalian operasional pendapatan daerah, (3) pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati, (4) pelaksanaan koordinasi unit-unit kerja terkait dalam penyusunan rencana program di bidang tugasnya, dan (5) pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, administrasi, surat menyurat, pengarsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga dinas.

Selanjutnya, penjabaran atas fungsi Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba sebagai pelaksana: (1) pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, (2) perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis di bidang pemungutan pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) kordinasi teknis pemungutan seluruh usa di bidang pemungutan retribusi dan pajak daerah dan peungutan lanilla berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) perencanaan, pelaksanaan, pengkajian, pengawasan dan pengendalian/evaluasi dan pengembangan serta penyuluhan pemungutan pendapatan daerah, (5) pengendalian dan pengawasan teknis di bidang pengelolaan pasar, (6) pengelolaan urusan ketatausahaan dinas, (7) membantu melakukan pekerjaan pendataan obyek dan subyek PBB, BPHTB dan PPh, (8) melakukan pendataan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, (9) membantu pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) dan sarana administrasi lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak serta membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada di bawah pengawasannya, (10) melakukan kordinasi dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan daerah lainnya, (11) melakukan kordinasi dan pengawasan atas penagihan pajak, retribusi daerah, dan PAD lainnya,

serta penagihan PBB, BPHTB dan PPh, (12) melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendapatan, penetapan dan penagihan pajak daerah retribusi daerah, PAD, dan PBB, (13) melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD lainnya serta PBB, BPHTB dan PPh, dan (14) melakukan urusan tata usaha.

Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba merupakan kordinator terhadap instansi-instansi pengelola PAD, diantaranya: (1) Dinas LLAJR (Perhubungan) dan Telekomunikasi, (2) Dinas Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi, (3) Dinas Perindustrian dan Parsenibud, (4) Dinas Pertanahan, Pemukiman dan Tata Ruang, (5) Dinas Kesehatan, (6) Dinas PUD (Kebersihan dan Pertamanan), (7) Dinas Pendapatan Daerah da Pasar, (8) Dinas Perikanan, (9) Dinas Peternakan, (10) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, dan (11) Dinas Kehutanan.

Adapun struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba terdiri atas: (1) Kepala Dinas, (2) Kepala Tata Usaha, yang terdiri atas: (a) Kasubag Umum dan Kepegawaian, (b) Kasubag Program, dan (c) Kasubag Keuangan, (3) Kepala Sub Dinas Pendataan dan Penetapan, yang terdiri atas; (a) Kasi Pendataan dan Pendaftaran, (b) Kasi Perhitungan, dan (c) Kasi Penetapan, (4) Kepala Sub Dinas Penagihan, yang terdiri atas: (a) Kasi Penagihan, (b) Kasi Keberatan, dan (c) Kasi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain-lain, (5) Kepala Sub Dinas Pembukuan, yang terdiri

atas: (a) Kasi Pembukuan Penerimaan, (b) Kasi Pembukuan Persediaan, dan (c) Kasi Pelaporan, dan (6) Kepala Sub Dinas Pasar, yang terdiri atas: (a) Kasi Penataan/Tata Ruang, (b) Kasi Operasional, dan (c) Kasi Pengawasan.

2. Keadaan SDM Aparatur (Pegawai), Sarana/Prasarana dan Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi diperlukan SDM aparatur (pegawai) yang memiliki kemampuan (kompetensi) yang memadai. Adapun jumlah pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba sebanyak 138 orang yang terdiri atas 49 orang PNS Daerah dan 89 orang Tenaga Kontrak Daerah. Untuk lebih jelasnya, keadaan SDM aparatur (pegawai) pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2: Keadaan SDM Aparatur (Pegawai) Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba

No.	Pangkat	Gol./Ruang	PNS-D/TKD	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	1
2.	Pembina Tk. I	IV/b	1	1
3.	Pembina	IV/a	2	2
4.	Penata Tk. I	III/d	16	16
5.	Penata	III/c	1	1
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	2	2
7.	Penata Muda	III/a	14	14
8.	Pengatur Tk. I	II/d	4	4
9.	Pengatur	II/c	1	1
10.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	4	4
11.	Pengatur Muda	II/a	3	3
12.	TKD	-	89	89
Jumlah			138	138

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder, 2007

Dari 49 orang PNS Daerah pegawai Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba, terdapat 1 orang yang telah melulusi diklat SPAMEN, 5 orang yang telah melulusi diklat SPAMA, dan 16 orang yang telah melulusi diklat ADUM.

Sementara itu, keadaan sarana dan prasarana Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba terdiri atas: gedung kantor, bangunan *chek point* sebanyak 3 unit, kendaraan roda dua sebanyak 31 unit, kendaraan roda empat sebanyak 3 unit, dan sarana penunjang kegiatan lainnya yang cukup memadai. Untuk lebih jelasnya, keadaan sarana dan prasarana pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3: Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	<i>Gedung Kantor</i>	1 unit	Luas 40 x 60 M ²
2.	<i>Gedung Chek Point</i>	3 unit	
3.	<i>Kendaraan Roda Empat</i>	3 buah	
4.	<i>Kendaraan Roda Dua</i>	31 buah	
5.	<i>Kalkulator</i>	6 buah	
6.	<i>Komputer Laptop</i>	3 buah	
7.	<i>Komputer/Monitor PC</i>	8 buah	
8.	<i>Printer Dot Matriks</i>	6 buah	
9.	<i>CPU</i>	1 buah	
10.	<i>Mesin Ketik</i>	3 buah	
11.	<i>Layar Protektor CD</i>	1 buah	
12.	<i>Meja Rapat</i>	3 buah	
13.	<i>TV 14 Inchi</i>	2 buah	
14.	<i>AC</i>	7 buah	
15.	<i>Printer Tinta</i>	1 buah	
16.	<i>Kursi Rapat</i>	60 buah	
17.	<i>Mesin Perporasi</i>	3 buah	
18.	<i>Kipas Angin</i>	6 buah	
19.	<i>Meja Komputer</i>	9 buah	
20.	<i>Kursi Tamu</i>	3 set	

21.	<i>Meja Kantor</i>	52 buah
22.	<i>Kursi Kantor</i>	55 buah
23.	<i>Papan Realisasi</i>	2 buah
24.	<i>Papan Struktur</i>	1 buah
25.	<i>Rak Buku</i>	3 buah
26.	<i>Brangkas</i>	3 buah
27.	<i>Lemari Kaca</i>	3 buah
28.	<i>Lemari Susun</i>	6 buah
29.	<i>Lemari Arsip</i>	7 buah
30.	<i>Lemari Pendek Olympic</i>	2 buah
31.	<i>Psw Monitor Transistor</i>	4 buah
32.	<i>Antene Vertikal</i>	2 buah
33.	<i>Alat Penghisap Debu</i>	1 buah
34.	<i>Jam Dinding</i>	3 buah
35.	<i>Lemari Filing Cabinet</i>	2 buah
36.	<i>Dispencer</i>	1 buah
37.	<i>Lemari Es</i>	1 buah
38.	<i>UPS</i>	3 buah
39.	<i>Stabilisator</i>	3 buah

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder, 2007

Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba pada tahun 2006 mengalokasikan dana sebesar Rp. 7.220.696.939,- dengan perincian: (a) belanja modal sebesar Rp. 1.032.500.000,-, (b) belanja operasional sebesar Rp. 2.670.482.236,-, dan (c) belanja administrasi umum sebesar Rp. 2.517.696.936,-.

Adapun sumber pembiayaan yang diharapkan berasal dari: (a) pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan, (b) pembagian dari pemerintah pusat bagi desa dan kabupaten untuk sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), (c) dana pembangunan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan (d) dana dari sumber lain yang diperoleh sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, misalnya:

dana revolving, dana sumbangan pihak ketiga, dan bantuan luar negeri dan lembaga keuangan lainnya.

3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba memiliki visi, yaitu: *"Mampu Mewujudkan Pendapatan Asli Daerah yang Optimal guna Mendukung Kemandirian Pelaksanaan Otonomi Daerah"*. Untuk memenuhi visi tersebut, Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba mencanangkan misi sebagai berikut: (a) menggali sumber-sumber PAD secara optimal, (b) menyediakan perlengkapan dan sarana yang memadai, dan (c) meningkatkan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan agar terbina kesadaran wajib pajak/wajib retribusi.

Adapun sasaran Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba Tahun 2006 adalah: (a) tersedianya data obyek pajak PBB, (b) terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi pasar, (c) terlaksananya rehabilitasi kantor, (d) terlaksananya pembangunan *cek point* Wae Pejje, (e) tercapainya target PBB, (f) tercapainya target penerimaan retribusi pasar, (g) tercapainya target penerimaan pajak penerangan jalan, (h) meningkatnya fasilitas pelayanan kantor, dan (i) terlaksananya pengawasan langsung terhadap petugas kolektor pasar se-Kabupaten Bulukumba. Sementara itu, program Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba Tahun

2006 adalah: (a) kapasitas penerimaan dan pengelolaan pendapatan, dan (b) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar kabupaten Bulukumba menetapkan kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan, yaitu (a) melaksanakan perencanaan, penagihan, penelitian, pembukuan, penyuluhan dan pembinaan serta pengawasan dan pengendalian di Bidang Pendapatan Daerah Pasar, (b) penciptaan aparatur yang profesional, (c) memberikan usulan untuk menempatkan staf sesuai dengan bidang keahliannya, dan (d) pengembangan sarana dan prasarana pelayanan publik.

Keempat kebijakan tersebut di atas menjadi pilar utama dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kebijaksanaan itu sendiri direncanakan akan dilaksanakan secara bersamaan dengan mengagendakan program sebagai berikut, yaitu: (a) program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, (b) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara, (c) program peningkatan kualitas pelayanan publik, dan (d) program optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.

Beberapa kegiatan Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba adalah: (a) pembaharuan data PBB dengan pola Sismiop di Kelurahan Tanah Lemo, Sapo Lohe, Tanah Beru, Desa Darubiah, Bira dan Lembanna, (b) pembangunan dan Rehabilitasi Pasar, (c) rehabilitasi Kantor

Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar, (d) pembangunan Chek Point Wae Pejje, (e) intensifikasi PBB dengan Pola SISTEP, (f) biaya jasa pemungutan pendapatan daerah, (g) penatausahaan alat rumah tangga kantor, dan (h) pengawasan langsung pelaksanaan pelayanan pasar.

C. Karakteristik Responden

Walaupun karakteristik responden tidak berhubungan langsung dengan fokus analisis dalam penelitian ini, namun demikian karakteristik responden akan memberikan gambaran tentang keadaan responden. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis akan memaparkan karakteristik responden terutama dalam hal: (a) jenis kelamin, (b) umur, (c) pendidikan formal, (d) pangkat/golongan, dan (e) masa kerja. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran bahwa karakteristik responden dari segi jenis kelamin menunjukkan sebanyak 57 orang atau (57,00 %) laki-laki dan sebanyak 43 orang atau (43,00 %) perempuan. Selanjutnya, berdasarkan umur responden menunjukkan sebanyak 39 orang atau (39,00 %) berumur 21 – 30 tahun, sebanyak 36 orang atau (36,00 %) berumur 31 – 40 tahun, dan sebanyak 25 orang atau (25,00 %) berumur 41 – 50 tahun.

Sementara itu, berdasarkan tingkat pendidikan formal responden menunjukkan sebanyak 49 orang atau (49,00 %) berpendidikan SMA/ sederajat, sebanyak 17 orang atau (17,00 %) berpendidikan Diploma, sebanyak 31 orang atau (31,00 %) berpendidikan S1 (sarjana lengkap), dan

sebanyak 3 orang atau (3,00 %) berpendidikan S2 (magister). Selanjutnya, berdasarkan pangkat/golongan responden menunjukkan sebanyak 12 orang atau (12,00 %) berpangkat/golongan II, sebanyak 33 orang atau (33,00 %) berpangkat/golongan III, sebanyak 4 orang atau (4,00 %) berpangkat/golongan IV, dan sebanyak 51 orang atau (51,00 %) PHL. Kemudian, berdasarkan masa kerja responden menunjukkan 53 orang atau (53,00 %) bermasa kerja 1 – 10 tahun, sebanyak 38 orang atau (38,00 %) bermasa kerja 11 – 20 tahun, dan sebanyak 9 orang (9,00 %) bermasa kerja 21 tahun ke atas. Untuk lebih jelasnya, karakteristik responden dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4: Karakteristik Responden

No.	Karakteristik Responden	Frekuensi	Persentase
I.	Jenis Kelamin		
	a. Laki-laki	57	57,00
	b. Perempuan	43	43,00
	Jumlah	100	100,00
II.	Umur (Tahun)		
	a. 21 – 30	39	39,00
	b. 31 – 40	36	36,00
	c. 41 – Ke atas	25	25,00
	Jumlah	100	100,00
III.	Pendidikan Formal		
	a. SMA	49	49,00
	b. Diploma	17	17,00
	c. S1	31	31,00
	d. S2	3	3,00
	Jumlah	100	100,00
IV.	Pangkat/Golongan		
	a. Golongan II	12	12,00
	b. Golongan III	33	33,00
	c. Golongan IV	4	4,00
	d. PHL	51	51,00
	Jumlah		100,00

V.	Masa Kerja (Tahun)	53	53,00
	a. 1 – 10	38	38,00
	b. 11 – 20	9	9,00
	c. 21 – Ke Atas	100	100,00
	Jumlah		

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2007

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses penyusunan anggaran dan faktor-faktor yang memengaruhinya pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba, maka pembahasan berikut ini akan diuraikan variabel-variabel penelitian, yaitu proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba. Uraian awal akan dideskripsikan terlebih dahulu tentang karakteristik responden dalam penelitian ini.

1. Proses Penyusunan Anggaran

Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK) merupakan dokumen yang memuat rancangan anggaran unit kerja sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. Berdasarkan Rencana Anggaran Satuan Kerja yang disampaikan oleh setiap unit kerja, Tim Anggaran Eksekutif mengevaluasi dan menganalisis hal-hal sebagai berikut: (1) kesesuaian antara rancangan anggaran unit kerja dengan program dan kegiatan yang direncanakan unit

kerja, (2) kesesuaian program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi unit kerja, dan (3) kewajaran antara anggaran dengan target kinerja berdasarkan SAB (standar analisis belanja) yang telah diperhitungkan. Rencana Anggaran Satuan Kerja memuat informasi mengenai unit kerja, antara lain mengenai: (1) Visi dan Misi, (2) Tujuan dan Sasaran, (3) Tugas Pokok dan Fungsi, (4) Bidang, Program dan Kegiatan, dan (5) Anggaran.

Oleh karena itu, rancangan anggaran satuan kerja (RASK) merupakan dokumen hasil proses penyusunan anggaran tingkat Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Untuk itu, maka dalam proses penyusunan anggaran pada tingkat unit kerja (SKPD) harus senantiasa memperhatikan substansi (hakekat) program dan kegiatan yang diusulkan (direncanakan) dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang bersangkutan, serta tingkat kewajaran antara usulan anggaran pada setiap program dan kegiatan yang direncanakan dengan target kinerja atau rencana kinerja unit kerja berdasarkan SAB (standar analisis belanja) yang telah diperhitungkan. Untuk melihat bagaimana tanggapan responden tentang proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5: Tanggapan Responden tentang Proses Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Sesuai	15	15,00
2.	Cukup Sesuai	41	41,00
3.	Kurang Sesuai	24	24,00
4.	Tidak Sesuai	20	20,00
Jumlah		100	100,00

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2007

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba sebanyak 15 orang atau 15,00 % menyatakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi (unit kerja) dan tingkat kewajaran anggaran setiap program dan kegiatan dengan target atau rencana kinerja organisasi berdasarkan SAB yang telah diperhitungkan, sebanyak 41 orang atau 41,00 % menyatakan cukup sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi (unit kerja) dan tingkat kewajaran anggaran setiap program dan kegiatan dengan target atau rencana kinerja organisasi berdasarkan SAB yang telah diperhitungkan, sebanyak 24 orang atau 24,00 % menyatakan kurang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi (unit kerja) dan tingkat kewajaran anggaran setiap program dan kegiatan dengan target atau rencana kinerja organisasi berdasarkan SAB yang telah diperhitungkan, dan sebanyak 20 orang atau 20 % menyatakan

tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi (unit kerja) dan tingkat kewajaran anggaran setiap program dan kegiatan dengan target atau rencana kinerja organisasi berdasarkan SAB yang telah diperhitungkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba adalah *cukup sesuai* dengan tugas pokok dan fungsi organisasi (unit kerja) dan tingkat kewajaran anggaran setiap program dan kegiatan dengan target atau rencana kinerja organisasi berdasarkan SAB yang telah diperhitungkan.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba menjelaskan bahwa proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba senantiasa didasarkan pada analisis ideal normatif dan aktual empirik. Artinya, dalam proses penyusunan anggaran tersebut harus didasarkan pada aspek-aspek yang menyangkut apa yang seharusnya dan aspek-aspek yang menyangkut apa yang menjadi kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis dan pembahasan yang mendalam dalam proses penyusunan anggaran tersebut.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba senantiasa didasarkan pada kesesuaian antara rancangan anggaran unit kerja dengan program dan kegiatan yang direncanakan unit kerja, kesesuaian program dan

kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi unit kerja, dan kewajaran antara anggaran dengan target kinerja berdasarkan SAB (standar analisis belanja) yang telah diperhitungkan. Hal inilah yang menjadi pedoman utama dalam proses penyusunan anggaran selama ini.

Beberapa hal yang menjadi muatan (lingkup) sekaligus menjadi tahapan-tahapan dalam proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba adalah: (1) penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, (2) pengisian formulir S3 B11, (3) penandatanganan RASK, (4) pemeriksaan/asistensi Tim Anggaran Eksekutif, (5) Rancangan APBD, dan (6) Tim Anggaran Eksekutif/Legislatif.

Dalam hal penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada Dinas Pendapatan daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba, terdapat dua hal utama yang menjadi fokus analisis yaitu bagaimana proses penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan itu berlangsung dan bagaimana keterlibatan seluruh pegawai dalam proses penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan tersebut.

Dalam proses penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba senantiasa berdasarkan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik terutama dalam mewujudkan tata

pemerintahan yang bersih dan berwibawa diantaranya: (1) penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini serta program dan kegiatan, (2) penyusunan rencana-rencana pembangunan (program dan kegiatan) secara partisipatif, (3) penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif dan efisien dengan struktur yang lebih profesional, ramping, luwes dan responsif, (4) peningkatan efektifitas dan efisiensi keterlaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini organisasi, (5) optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan *e-government* dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, dan (6) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Disamping itu, penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba harus didasarkan atau berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba. Penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba ini akan berwujud sebagai dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA) SKPD yang bersangkutan. Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu SKPD harus menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan oleh

Kementerian dan Lembaga. Untuk itu, penerapan perencanaan setiap SKPD harus direncanakan sehingga diketahui bilamana standar tersebut dapat sepenuhnya tercapai berikut dengan usaha-usaha guna mempertahankan pencapaian kinerja tersebut.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka setiap SKPD dalam penyusunan perencanaan strategisnya harus memuat dengan baik materi utama Renstra SKPD tersebut yang terdiri atas: visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi, dan kebijakan, program SKPD dengan rincian kegiatan dan anggaran yang bersifat indikatif. Untuk melihat bagaimana tanggapan responden tentang proses penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan (Perencanaan Strategis) pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6: Tanggapan Responden tentang Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Tugas Pokok dan Fungsi, Program dan Kegiatan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Tersusun dengan Baik	12	12,00
2.	Cukup Tersusun dengan Baik	39	39,00
3.	Kurang Tersusun dengan Baik	27	27,00
4.	Tidak Tersusun dengan Baik	22	22,00
Jumlah		100	100,00

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2007

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, tugas pokok dan fungsi,

program dan kegiatan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba sebanyak 12 orang atau 12,00 % menyatakan tersusun dengan baik, sebanyak 39 orang atau 3,00 % menyatakan cukup tersusun dengan baik, sebanyak 27 orang atau 27 % menyatakan kurang tersusun dengan baik, dan sebanyak 22 orang atau 22,00 % menyatakan tidak tersusun dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba adalah cukup *tersusun dengan baik*. Hal ini berarti, bahwa penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba telah sesuai dengan substansi (hakekat) kaidah, dan tata urutan penyusunan strategis SKPD termasuk rencana sasaran yang hendak dicapai dan rencana kegiatan yang dengan jelas telah memuat lokasi, keluaran langsung, dan sumber daya yang diperlukan serta bersifat indikatif.

Penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba dianggap cukup tersusun dengan baik berdasarkan pada substansi (hakekat), kaidah dan tata urutan penyusunan perencanaan strategis SKPD. Hal ini sangat penting mengingat Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahun yang disusun sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang kemudian menjadi pedoman SKPD yang bersangkutan dalam merumuskan rancangan awal perencanaan kinerja (Renja) SKPD tersebut.

Lebih lanjut, penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba dianggap cukup tersusun dengan baik karena Renstra SKPD Dinas Pendapatan Daerah dan Pendapatan Kabupaten Bulukumba sebagai sebuah dokumen perencanaan didalamnya telah dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai termasuk rencana kegiatan yang dengan jelas telah memuat lokasi, keluaran langsung, dan sumber daya yang diperlukan serta bersifat indikatif.

Selanjutnya, proses penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba sangat ditentukan oleh keterlibatan seluruh pegawai. Keterlibatan seluruh pegawai dalam proses penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan suatu organisasi merupakan suatu kemutlakan (keharusan). Hal ini menjadi sangat penting mengingat pegawai adalah penggerak utama organisasi. Oleh karena itu, seluruh pegawai harus dapat memahami dan mengimplementasikan dengan baik apa yang menjadi visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan organisasinya. Untuk memahami dan mengimplementasikan dengan baik visi, misi, tujuan, sasaran, program

dan kegiatan bagi setiap pegawai dalam organisasi maka jalan satu-satunya adalah melibatkan seluruh pegawai tersebut dalam proses penyusunannya.

Disamping itu, dengan melibatkan seluruh pegawai dalam proses penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan organisasi, maka setiap pegawai akan merasakan kepemilikan atas organisasi dan bertanggung jawab terhadap proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi tersebut. Mereka akan senantiasa meningkatkan kinerjanya masing-masing sesuai dengan bidang tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk melihat bagaimana tanggapan responden tentang keterlibatan seluruh dalam proses penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7: Tanggapan Responden tentang Keterlibatan Seluruh Pegawai Dalam Proses Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Pasar Kabupaten Bulukumba

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Terlibat	16	16,00
2.	Cukup Terlibat	62	62,00
3.	Kurang Terlibat	12	12,00
4.	Tidak Terlibat	10	10,00
Jumlah		100	100,00

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2007

Hasil tanggapan responden tentang keterlibatan seluruh pegawai dalam penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, tugas pokok dan fungsi,

program dan kegiatan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa sebanyak 16 orang atau 16,00 % menyatakan terlibat, sebanyak 62 orang atau 62,00 % menyatakan cukup terlibat, sebanyak 12 orang atau 12,00 % menyatakan kurang terlibat, dan sebanyak 10 orang atau 10,00 % menyatakan tidak terlibat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterlibatan seluruh pegawai dalam penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba adalah *cukup terlibat*.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba menyatakan bahwa bentuk keterlibatan seluruh pegawai dalam proses penyusunan Renstra SKPD (visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan) dapat dilihat dalam dua hal, yaitu (1) keterlibatan pegawai dalam menyusun materi utama Renstra SKPD dalam arti hakekat dan substansinya, dan (2) keterlibatan pegawai secara teknis penyusunan materi Renstra SKPD sebagai sebuah dokumen perencanaan SKPD terutama dalam hal menjabarkan visi, misi, dan program SKPD.

Selanjutnya, setelah proses penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dilaksanakan, maka proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba secara

teknis adalah pengisian formulir S3 B11 oleh setiap seksi. Setiap seksi diharapkan dapat melaksanakan pengisian formulir S3 B11 dengan baik berdasarkan usulan dan saran dari seluruh pegawai di setiap seksi tersebut. Untuk melihat bagaimana tanggapan responden tentang pelaksanaan pengisian formulir S3 B11 oleh setiap Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba

Tabel 8: Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Pengisian Formulir S3 B11 Oleh Setiap Seksi Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Pasar Kabupaten Bulukumba

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Terlaksana dengan Baik	11	11,00
2.	Cukup Terlaksana dengan Baik	53	53,00
3.	Kurang Terlaksana dengan Baik	23	23,00
4.	Tidak Terlaksana dengan Baik	13	13,00
Jumlah		100	100,00

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2007

Hasil tanggapan responden tentang pelaksanaan pengisian formulir S3 B11 oleh setiap Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa pelaksanaan pengisian formulir S3 B11 oleh Seksi-seksi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba sebanyak 11 orang atau 11,00 % menyatakan terlaksana dengan baik, sebanyak 53 orang atau 53,00 % menyatakan cukup terlaksana dengan baik, sebanyak 23 orang atau 23,00 % menyatakan kurang terlaksana dengan baik, dan sebanyak 13 orang atau 13,00 menyatakan tidak terlaksana

dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengisian formulir S3 B11 oleh Seksi-seksi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba adalah *cukup terlaksana dengan baik*.

Proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba selanjutnya adalah pelaksanaan penandatanganan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) oleh Kepala Dinas. Untuk melihat bagaimana tanggapan responden tentang pelaksanaan penandatanganan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) oleh Kepala Dinas pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9: Tanggapan Responden tentang Pelaksanaan Penandatanganan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) oleh Kepala Dinas pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Terlaksana dengan Baik	17	17,00
2.	Cukup Terlaksan dengan Baik	59	59,00
3.	Kurang Terlaksana dengan Baik	14	14,00
4.	Tidak Terlaksana dengan Baik	10	10,00
Jumlah		100	100,00

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2007

Hasil tanggapan responden tentang pelaksanaan penandatanganan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) oleh Kepala Dinas pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang pelaksanaan penandatanganan RASK dalam

rangka penyusunan anggaran oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba sebanyak 17 orang atau 17,00 % menyatakan terlaksana dengan baik, sebanyak 59 orang atau 59,00 % menyatakan cukup terlaksana dengan baik, sebanyak 14 orang atau 14,00 % menyatakan kurang terlaksana dengan baik, dan sebanyak 10 orang atau 10,00 % menyatakan tidak terlaksana dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penandatanganan RASK dalam rangka penyusunan anggaran oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba cukup terlaksana dengan baik.

Selanjutnya, hasil tanggapan responden tentang pelaksanaan pemeriksaan/asistensi Tim Anggaran Eksekutif dalam rangka penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang pelaksanaan pemeriksaan/asistensi Tim Anggaran Eksekutif dalam rangka penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba sebanyak 33 orang atau 33,00 % menyatakan terlaksana dengan baik, sebanyak 49 orang atau 49,00 % menyatakan cukup terlaksana dengan baik, sebanyak 11 orang atau 11,00 % menyatakan kurang terlaksana dengan baik, dan sebanyak 7 orang atau 7,00 % menyatakan tidak terlaksana dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan/asistensi Tim Anggaran Eksekutif pada Dinas Pendapatan

Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba adalah *cukup terlaksana dengan baik*.

Selanjutnya, dilakukan perumusan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. hasil tanggapan responden tentang perumusan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang perumusan rancangan APBD pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba sebanyak 14 orang atau 14,00 % menyatakan terumuskan dengan baik, sebanyak 62 orang atau 62,00 % menyatakan cukup terumuskan dengan baik, sebanyak 16 orang atau 16,00 % menyatakan kurang terumuskan dengan baik, dan sebanyak 8 orang atau 8,00 % menyatakan tidak terumuskan dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perumusan rancangan APBD pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba adalah *cukup terumuskan dengan baik*.

Dalam proses perumusan APBD diharapkan terjalin kerjasama yang baik antara tim eksekutif dan legislatif sehingga tercipta efektifitas dan efisiensi proses penyusunan rancangan APBD sampai ditetapkannya menjadi APBD. Hasil tanggapan responden tentang kerjasama antara Tim Anggaran Eksekutif dan Legislatif dalam proses penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang kerjasama antara Tim Eksekutif dan Legislatif sebanyak

37 orang atau 37,00 % menyatakan bekerjasama dengan baik, sebanyak 38 orang atau 38,00 % menyatakan cukup bekerjasama dengan baik, sebanyak 16 orang atau 16,00 % menyatakan kurang bekerjasama dengan baik, dan sebanyak 9 orang atau 9,00 % menyatakan tidak bekerjasama dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara Tim Eksekutif dan Legislatif adalah *cukup bekerjasama dengan baik*.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Penyusunan Anggaran

Dalam proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba teridentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi dan menentukan keberhasilannya, diantaranya: kualitas (kompetensi) dan jumlah SDM, dukungan sarana dan prasarana, dan kompleksitas (jumlah) program dan kegiatan. Untuk itu, penulis akan menguraikan dan menganalisis faktor-faktor dalam proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan dan Pasar Kabupaten Bulukumba tersebut sebagai berikut:

a. Kualitas (Kompetensi) dan Jumlah SDM

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba adalah faktor kualitas (kompetensi) dan jumlah SDM aparatur yang terlibat. Keterlibatan seorang pegawai baik langsung maupun tidak langsung dalam

proses penyusunan anggaran akan sangat ditentukan oleh kualitas (kompetensinya). Dalam hal kualitas (kompetensi) pegawai, beberapa instrumen yang digunakan adalah tingkat pendidikan formal pegawai, pendidikan dan pelatihan teknis penyusunan anggaran, dan pengalaman kerja. Ketiga instrumen kualitas (kompetensi) pegawai ini pulalah yang akan menentukan seberapa banyak (jumlah) pegawai yang akan terlibat langsung dan tidak langsung dalam proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba.

Untuk melihat bagaimana tanggapan responden tentang kualitas (kompetensi) SDM aparatur dalam proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10: Tanggapan Responden tentang Kualitas (Kompetensi) SDM Aparatur dalam Proses Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berkualitas	11	11,00
2.	Cukup Berkualitas	26	26,00
3.	Kurang Berkualitas	50	50,00
4.	Tidak Berkualitas	13	13,00
Jumlah		100	100,00

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2007

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang kualitas (kompetensi) SDM aparatur dalam proses penyusunan

anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba sebanyak 11 orang atau 11,00 % menyatakan berkualitas, sebanyak 26 orang atau 26,00 % menyatakan cukup berkualitas, sebanyak 50 orang atau 50,00 % menyatakan kurang berkualitas, dan sebanyak 13 orang atau 13,00 % menyatakan tidak berkualitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas (kompetensi) SDM aparatur dalam proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba adalah *kurang berkualitas*.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba menjelaskan bahwa dalam hal kualitas (kompetensi) pegawai dalam proses penyusunan anggaran dapat diidentifikasi ke dalam tiga instrumen, yaitu: tingkat pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan teknis penyusunan anggaran dan pengalaman kerja. Dalam hal tingkat pendidikan formal, seluruh pegawai yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana (S1) ke atas diharapkan (menjadi keharusan) untuk terlibat langsung secara substansial dalam proses penyusunan anggaran, mulai dalam melaksanakan fungsi perencanaan berupa penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta keseluruhan analisis yang terdapat didalamnya. Salah satu analisis inti dalam proses penyusunan anggaran adalah analisis program dan kegiatan dalam kesesuaiannya dengan besaran anggaran yang

direncanakan, personil (pegawai) yang terlibat melalui pendekatan input, proses, output, outcomes, benefit dan impact.

Sementara itu, bagi pegawai yang berpendidikan SMA dan Diploma dalam proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba lebih banyak difungsikan secara teknis operasional seperti sebagai operator komputer dan sebagai penunjang (pendukung) kelancaran proses penyusunan anggaran dalam bentuk *supporting*.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pegawai yang memiliki atau melulusi pendidikan dan pelatihan penyusunan anggaran senantiasa terlibat langsung. Sekalipun diakui bahwa masih sangat minim jumlah pegawai yang melulusi diklat penyusunan anggaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, selain dari pendidikan dan pelatihan khusus mengenai penyusunan anggaran, program peningkatan kapasitas aparatur direncanakan dan diimplementasikan secara terus menerus dalam rangka memfasilitasi penyediaan aparat pemerintah yang berkualitas dan profesional dalam hal penyusunan rencana pengelolaan anggaran, peningkatan pelayanan publik. Untuk melihat bagaimana tanggapan responden tentang kuantitas (jumlah) SDM aparatur yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11: Tanggapan Responden tentang Kuantitas (Jumlah) SDM Aparatur dalam Proses Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Memadai	18	18,00
2.	Cukup Memadai	41	41,00
3.	Kurang Memadai	32	32,00
4.	Tidak Memadai	9	9,00
Jumlah		100	100,00

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2007

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang kuantitas (jumlah) SDM aparatur yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba sebanyak 18 orang atau 18,00 % menyatakan memadai, sebanyak 41 orang atau 41,00 % menyatakan cukup memadai, sebanyak 32 orang atau 32,00 % menyatakan kurang memadai, dan sebanyak 9 orang atau 9,00 % menyatakan tidak memadai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kuantitas (jumlah) SDM aparatur yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba adalah *cukup memadai*.

b. Dukungan Sarana dan Prasarana

Selain faktor kualitas (kompetensi) dan kuantitas (jumlah) pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran, faktor dukungan sarana dan prasarana yang tersedia juga sangat menentukan keberhasilan proses

penyusunan anggaran tersebut. Beberapa kegiatan dalam program peningkatan sarana dan prasarana pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba diantaranya penambahan ruang kerja, pengadaan perangkat keras berbasis Sisdur MAPATDA, dan pengadaan peralatan kantor dan rumah tangga. Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap aparatur sesuai bidang tugas dan keahliannya secara afektif dan efisien. Untuk melihat bagaimana tanggapan responden tentang dukungan sarana dan prasarana dalam proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 12: Tanggapan Responden tentang Dukungan (Jumlah) Sarana dan Prasarana dalam rangka Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Mendukung	7	7,00
2.	Cukup Mendukung	11	11,00
3.	Kurang Mendukung	54	54,00
4.	Tidak Mendukung	28	28,00
Jumlah		100	100,00

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2007

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang dukungan sarana dan prasarana dalam proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba sebanyak 7 orang atau 7,00 % menyatakan mendukung, sebanyak 11 orang

atau 11,00 % menyatakan cukup mendukung, sebanyak 54 orang atau 54,00 % menyatakan kurang mendukung, dan sebanyak 28 orang atau 28,00 % menyatakan tidak mendukung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dukungan sarana dan prasarana dalam proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba adalah *kurang mendukung*.

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba menjelaskan bahwa proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba harus didukung dengan baik oleh ketersediaan sarana dan prasarana terutama dalam hal teknis proses penyusunan anggaran tersebut yang akan berdampak terhadap waktu dan kualitas teknis penyelesaian penyusunan anggaran tersebut. Dalam kenyataannya, dukungan sarana dan prasarana dalam proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba sangat tidak memadai. Hal ini mengingat bahwa tingkat ketersediaan sarana pekerjaan terutama komputer baik komputer laptop (note book) maupun komputer/monitor PC masih sangat terbatas jumlahnya.

Demikian juga, program yang terdapat didalam komputer tersebut dianggap sudah tidak memadai untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan proses penyusunan anggaran secara teknis mengingat penyusunan

anggaran SKPD menggunakan dan mengaplikasikan sistem komputerasi (sistem database). Oleh karena itu, ke depan diharapkan dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba sangat memprioritaskan adanya penambahan jumlah dan kualitas komputer dalam mendukung pelaksanaan keseluruhan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Selanjutnya, untuk melihat bagaimana tanggapan responden tentang kualitas sarana dan prasarana dalam proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 13: Tanggapan Responden tentang Dukungan (Kualitas) Sarana dan Prasarana dalam Proses Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berkualitas	6	6,00
2.	Cukup Berkualitas	16	16,00
3.	Kurang Berkualitas	47	47,00
4.	Tidak Berkualitas	31	31,00
Jumlah		100	100,00

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2007

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang kualitas sarana dan prasarana dalam proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba sebanyak 6 orang atau 6,00 % menyatakan berkualitas, sebanyak 16 orang atau

16,00 % menyatakan cukup berkualitas, sebanyak 47 orang atau 47,00 % menyatakan kurang berkualitas, dan sebanyak 31 orang atau 31,00 % menyatakan tidak berkualitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas sarana dan prasarana dalam proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba adalah kurang berkualitas.

Hasil tanggapan responden tersebut di atas, diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba yang menyatakan bahwa disamping keterbatasan dari segi jumlah (kuantitas) prasarana dan sarana terutama peralatan kerja dalam hal ini komputer dan peralatan kerja lainnya, juga dari segi kualitas sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat dari program software (perangkat lunak) komputer dalam bentuk sistem dan program komputer yang dianggap sudah tertinggal dibandingkan dengan tingkat kebutuhan dan tuntutan pelaksanaan pekerjaan (tugas dan fungsi) organisasi. Oleh karena itu, ke depan diharapkan kualitas peralatan kerja kantor dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pekerjaan itu sendiri.

c. Kompleksitas (Jumlah) Program dan Kegiatan

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba

adalah faktor kompleksitas (jumlah) program dan kegiatan yang ditetapkan. Kompleksitas (jumlah) program dan kegiatan yang menjadi rencana program dan kegiatan dalam proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba adalah jumlah dan substansi (materi) dari program dan kegiatan yang direncanakan tersebut. Kompleksitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyusunan sejumlah program dan kegiatan dengan seluruh kelengkapan rinciannya secara indikatif termasuk perencanaan kinerjanya mulai dari input, proses, output, outcomes, impact dan benefits. Untuk melihat bagaimana tanggapan responden tentang kompleksitas (jumlah) program dan kegiatan dalam proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 14: Tanggapan Responden tentang Kompleksitas Program dan Kegiatan dalam Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Kompleks	10	10,00
2.	Cukup Kompleks	14	14,00
3.	Kurang Kompleks	45	45,00
4.	Tidak Kompleks	31	31,00
Jumlah		100	100,00

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2007

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang kompleksitas (jumlah) program dan kegiatan dalam proses

penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba sebanyak 10 orang atau 10,00 % menyatakan kompleks, sebanyak 14 orang atau 14,00 % menyatakan cukup kompleks, sebanyak 45 orang atau 45,00 % menyatakan kurang kompleks, dan sebanyak 31 orang atau 31,00 % menyatakan tidak kompleks. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompleksitas (jumlah) program dan kegiatan dalam proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba adalah *kurang kompleks*.

Hal lain yang menjadi analisis kompleksitas (jumlah) program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba adalah tingkat kerumitan teknis dalam arti penguasaan terhadap program database sistem komputerisasi penyusunan anggaran tersebut. Adapun untuk melihat bagaimana tanggapan responden tentang kerumitan sistem database program RKA-KL dalam penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 15: Tanggapan Responden tentang Kerumitan Sistem Database Program RKA-KL dalam Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Rumit	14	14,00
2.	Cukup Rumit	15	15,00
3.	Kurang Rumit	44	44,00
4.	Tidak Rumit	27	27,00
Jumlah		100	100,00

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2007

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang kerumitan sistem data base RKA-KL dalam proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba sebanyak 14 orang atau 14,00 % menyatakan rumit, sebanyak 15 orang atau 15,00 % menyatakan cukup rumit, sebanyak 44 orang atau 44,00 % menyatakan kurang rumit, dan sebanyak 27 orang atau 27 % menyatakan tidak rumit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kerumitan sistem data base RKA-KL dalam penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba adalah *kurang rumit*.

Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Program Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba menjelaskan bahwa setiap perkembangan dan tuntutan akan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi senantiasa direspon secara positif dengan mengupayakan hal-hal nyata. Dalam hal melaksanakan pekerjaan proses penyusunan anggaran

Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba yang berbasis sistem komputerisasi melalui program RKA-KL dengan sistem database tersebut, organisasi senantiasa mengantisipasinya dengan melakukan pengiriman pegawai untuk mempelajari sistem komputerisasi tersebut. Dalam pelaksanaannya, pendidikan dan pelatihan penguasaan sistem atau program RKA-KL oleh Departamen Keuangan dilakukan secara simultan dan bersinergi langsung dengan penyusunan anggaran dimana pelatihan tersebut bersifat aplikatif yang sekaligus melakukan proses penyusunan anggaran pada setiap SKPD.

3. Pengaruh Kualitas SDM Aparatur, Dukungan Sarana dan Prasarana dan Kompleksitas Program dan Kegiatan terhadap Proses Penyusunan Anggaran

Setelah proses penyusunan anggaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi telah diuraikan secara deskriptif, maka berikut ini akan dipaparkan hasil analisis regresi (model hubungan) dan koefisien korelasi (keeratan hubungan) antara faktor-faktor tersebut. Untuk lebih jelasnya, hasil analisis regresi atas faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 16: Hasil Regresi Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Proses Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.793 ^a	.630	.618	.605

- a. Predictors: (Constant), Kompleksitas program & kegiatan, kualitas SDM aparatur, Dukungan sarana & prasarana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.615	.253		-2.427	.017
	kualitas SDM aparatur	.467	.089	.403	5.250	.000
	Dukungan sarana & prasarana	.405	.104	.340	3.899	.000
	Kompleksitas program & kegiatan	.215	.082	.203	2.612	.010

- a. Dependent Variable: proses penyusunan anggaran

Berdasarkan perhitungan di atas, maka model persamaan linear dari hubungan sub variabel kualitas sumber daya manusia aparatur, dukungan (kuantitas dan kualitas) sarana dan prasarana, dan kompleksitas program dan kegiatan terhadap proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba menjadi $Y = -0,615 + 0,467 X_1 + 0,405 X_2 + 0,215 X_3$ dari persamaan ini dapat dipahami bahwa hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba akan membentuk hubungan positif. Hal ini berarti bahwa setiap faktor-faktor atau semua faktor-faktor secara sendiri-sendiri atau bersamaan memiliki pengaruh positif

terhadap proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba. Demikian juga, dalam hal terjadi atau dilakukan upaya peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia aparatur, sarana dan prasarana (kuantitas dan kualitas) maka akan berpengaruh positif terhadap proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba.

Dari rangkaian perhitungan dan pembahasan atas sub variabel-sub variabel yang berpengaruh terhadap proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba, dapat diketahui bahwa sub-variabel yang paling berpengaruh adalah kualitas sumber daya manusia aparatur, kemudian dukungan sarana dan prasarana berpengaruh kedua, dan kompleksitas program dan kegiatan berpengaruh ketiga.

Selanjutnya, harga koefisien determinasi (r^2) menunjukkan $R^2 = 0,469$. Harga atau nilai ini dapat diartikan bahwa sebesar 46,90 % yang merupakan akumulasi masing-masing sub variabel kualitas sumber daya manusia aparatur, dukungan sarana dan prasarana dan kompleksitas program dan kegiatan berpengaruh terhadap proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba. Sedangkan 53,10 % proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba ditentukan oleh faktor lain selain

dari faktor kualitas sumber daya manusia aparatur, dukungan sarana dan prasarana, dan kompleksitas program dan kegiatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba berada pada kategori cukup sesuai dengan program dan yang direncanakan unit kerja, tugas pokok dan fungsi unit kerja, dan kewajaran antara anggaran dengan target kinerja berdasarkan SAB (standar analisis belanja) yang telah diperhitungkan.
2. Terdapat beberapa faktor yang secara signifikan mempengaruhi proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba, masing-masing:
 - a. Kualitas (kompetensi) SDM aparatur berada pada kategori kurang berkualitas. Faktor kualitas SDM aparatur memiliki pengaruh positif terhadap proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba melalui indikator tingkat pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan teknis penyusunan anggaran dan pengalaman kerja.
 - b. Dukungan sarana dan prasarana yaitu jumlah dan kualitasnya berada pada kategori kurang mendukung. Faktor dukungan sarana

dan prasarana memiliki pengaruh positif terhadap proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba. Hal ini terutama sarana peralatan kerja yakni komputer baik dari segi software maupun hardwarenya.

- c. Kompleksitas (jumlah) program dan kegiatan berada pada kategori kurang kompleks. Hal ini terutama dapat dilihat dalam hal substansi dan teknis penyusunan program dan kegiatan dalam proses penyusunan anggaran.
3. Berdasarkan model persamaan linear dari hubungan antara sub variabel kualitas sumber daya manusia aparatur, dukungan sarana dan prasarana, dan kompleksitas program dan kegiatan terhadap proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba menjadi $Y = -0,615 + 0,467 X_1 + 0,405 X_2 + 0,215 X_3$ dari persamaan ini dapat dipahami bahwa hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba akan membentuk hubungan positif baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan.
 4. Dari rangkaian perhitungan dan pembahasan atas sub variabel-sub variabel yang berpengaruh terhadap proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba, dapat diketahui bahwa sub-variabel yang paling berpengaruh adalah kualitas

sumber daya manusia aparatur, kemudian dukungan sarana dan prasarana berpengaruh kedua, dan kompleksitas program dan kegiatan berpengaruh ketiga.

5. Koefisien determinasi (r^2) menunjukkan $R^2 = 0,469$. Artinya bahwa sebesar 46,90 % yang merupakan akumulasi masing-masing sub variabel kualitas sumber daya manusia aparatur, dukungan sarana dan prasarana dan kompleksitas program dan kegiatan berpengaruh terhadap proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba. Sedangkan 53,10 % proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba ditentukan oleh faktor lain selain dari faktor kualitas sumber daya manusia aparatur, dukungan sarana dan prasarana, dan kompleksitas program dan kegiatan.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil dan pembahasan penelitian ini, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai saran dan masukan dalam proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bulukumba pada umumnya dan Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba pada khususnya dalam proses penyusunan anggaran harus senantiasa memperhatikan

faktor kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur yang terlibat langsung dalam proses penyusunan anggaran tersebut. Demikian juga, dukungan sarana dan prasarana dan kompleksitas program dan kegiatan. Faktor-faktor ini memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja baik secara individu maupun secara kelembagaan terhadap proses penyusunan anggaran pada setiap SKPD.

2. Diperlukan komitmen yang tinggi bagi pimpinan Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar Kabupaten Bulukumba terutama terhadap faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran tersebut. Hal ini mengingat, bahwa kontribusi faktor-faktor lain selain faktor kualitas sumber daya manusia aparatur, dukungan sarana dan prasarana, dan kompleksitas program dan kegiatan masih besar yaitu sebesar 37,00 persen. Beberapa faktor tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut: faktor kepemimpinan, faktor motivasi kerja, faktor keterlibatan (partisipasi) pegawai dalam perencanaan program dan kegiatan, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander., 2002, ***Perencanaan Daerah Partisipatif***. Pondok Edukasi, Solo.
- Arsyad, Nurjaman, dkk., 1992, ***Keuangan Negara***, Intermedia, Jakarta.
- Bachrul, Elim., 2002, ***Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia***, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Balitbangda Pemerintah Provinsi Sul-Sel., 2003, ***Analisis Potensi Penyimpangan Penggunaan Dana Pembangunan Daerah di Sulawesi Selatan***, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.
- Barata, Atep Adya dan Bambang Trihartanto., 2001, ***Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara***, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Baswir, Revrisond., 1997, ***Akuntansi Pemerintahan Indonesia***, Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta.
- Depdagri., 2004, ***Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah***, Sinar Grafika, Jakarta.
- ., 2004, ***Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Devas, Nik, dkk., 1989, ***Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia***, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Gade, M., 1998, ***Akuntansi Pemerintahan***, Edisi Revisi, Fakultas Ekonomi – Universitas Indonesia, Jakarta.
- Gary, Dessler., 2006, ***Manajemen Sumber Daya Manusia***, PT. Indeks, Jakarta.

- Harryanto dan Syahrir., 2008, ***Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba: Kasus Penyusunan APBD Tahun 2008***, (Laporan Penelitian), Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Karyoso, 2005., ***Manajemen Perencanaan dan Penganggaran***, Penerbit PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta.
- Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia., 2004, ***Reformasi Sektor Pelayanan Publik***, Copyright oleh Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Website Pentasoft, www.goggle.co.id.
- Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia., 2005, ***Studi Model Penerapan Akuntabilitas Pelayanan Publik***, Copyright oleh Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Website Pentasoft, www.goggle.co.id.
- Kunarjo., 1993, ***Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan***, Edisi Ketiga, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Mamesah, D.J., 1995, ***Sistem Administrasi Keuangan Daerah***, PT. Gramedia dan Trend Ekonomi Daerah, Yogyakarta.
- Mardiasmo., 1993, ***Memperkokoh Otonomi Daerah, Kebijakan, Evaluasi dan Sasaran***, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.
- ., 2000, ***Pengembangan Model Standar Analisa Belanja (SAB) Anggaran Daerah (APBD)***, Laporan Akhir, PAU-SE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- ., 2003, ***Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah***, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- ., 2004, ***Akuntansi Sektor Publik***, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Moeloeng, Lexy., 2001, ***Metode Penelitian Kualitatif***, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Musgrave, R.A., dan Musgrave, P.B., 1984, ***Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek***, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Santoso, T.B., 2000, ***Akuntansi Manajerial***, Salemba Empat, Jakarta.
- Soeling, P.D., 1997, ***Pemberdayaan Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Pelayanan dalam Bisnis Birokrasi***, (Jurnal), Nomor 2/Volume III Agustus/1997, Jakarta.
- Suaib, Zulkifli., 2007, ***Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Penyusunan Rencana Kerja Anggaran pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2006 dan 2007*** (Tesis), Program Pascasarjana Magister Keuangan Daerah, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Suparmoko, M., 1986, ***Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek***, Edisi Kelima, BPFE, Yogyakarta.
- Sugiyono., 2006, ***Metode Penelitian Administrasi***, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Syamsi, I., 1994, ***Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara***, Rineka Cipta, Jakarta.
- Yuwono, S., Tengku Agus dan Haryadi., 2005, ***Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD Berbasis Kinerja***, Bayumedia Publishing, Malang.